



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-08.TI.05.01 TAHUN 2023

TENTANG

**MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai panduan penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDUA : Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari formulir sebagai berikut:

- a. Konteks Risiko SPBE
 - 1) Informasi Umum;
 - 2) Sasaran SPBE; dan
 - 3) Stuktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE;
- b. Penilaian Risiko SPBE
 - 1) Identifikasi Risiko SPBE;
 - 2) Analisis Risiko SPBE; dan
 - 3) Evaluasi Risiko SPBE;
- c. Rencana Penanganan Risiko SPBE.


KETIGA : Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui serangkaian proses:

- a. Identifikasi dan Analisis Risiko SPBE, dilakukan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan;
- b. Pengendalian Risiko SPBE, dilakukan pada bulan Januari tahun berjalan;
- c. Pemantauan Risiko SPBE, dilakukan pada setiap triwulan; dan
- d. Evaluasi Risiko SPBE, dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kantor wilayah dan unit pelaksana teknis ditetapkan oleh kepala kantor wilayah dan kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan formulir Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh unit utama dan kantor wilayah berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal.
- KEENAM : Pelaksanaan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada unit utama dan kantor wilayah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-08.TI.05.01 TAHUN 2023

Tanggal : 29 Maret 2023

**MANAJEMEN RISIKO SPBE
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Sekretariat Jenderal

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tugas UPR SPBE	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Fungsi UPR SPBE	a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya nilai indeks SPBE Kementerian Hukum dan HAM / Terselenggaranya pelayanan dan pelaksanaan berbasis eletronik secara efektif dan efisien	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE
		Domain Layanan SPBE
		Domain Manajemen SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Sekretaris Jenderal
Koordinator Risiko SPBE	Hermansyah Siregar Kepala Pusat data dan Teknologi Informasi
Pengelola Risiko SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machyudhie, Koordinator Bidang Data dan Pengamanan Jaringan; 2. Zulfahmi, Koordinator Bidang Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi; 3. Nandha Adami Prihatma, SubKoordinator Perencanaan dan Pengembangan TI; 4. Nova Dahliyanti, SubKoordinator Standarisasi Teknologi Informasi; 5. Rochmayani, Plh SubKoordinator Evaluasi dan Kerjasama Teknologi Informasi; 6. Edhi Hendrico, SubKoordinator Pengamanan Data dan Jaringan; 7. Raharyo Handono, SubKoordinator Pemeliharaan Teknologi Informasi; 8. Tomy Kurniawan, SubKoordinator Pengelolaan Data dan Informasi

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Kebijakan SPBE	Negatif	1. Terkadang proses bisnis layanan terkendala	1. Dokumen Kebijakan belum disusun 2. Dokumen Kebijakan belum di evaluasi 3. Tidak dilakukan sosialisasi terkait kebijakan	- Proses Bisnis - Layanan SPBE - Kepatuhan terhadap peraturan	1. Reputasi organisasi menjadi buruk 2. Layanan Organisasi tidak berjalan dengan baik 3. Kinerja tidak terukur 4. Sumber Daya Manusia tidak berkembang	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Sumber Daya Manusia
Domain Kebijakan SPBE	Negatif	2. Masih ada praktik Calo, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pungutan Liar pada proses bisnis organisasi	1. Pelayanan tidak sesuai prosedur dan kurang dilakukan evaluasi	- Proses Bisnis - Layanan SPBE - Kepatuhan terhadap peraturan	1. Reputasi organisasi menjadi buruk 2. Layanan Organisasi tidak berjalan dengan baik 3. Kinerja tidak terukur 4. Sumber Daya Manusia tidak berkembang	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Sumber Daya Manusia
Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	3. Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet sehingga Layanan SLA ISP belum terpenuhi	1. Pembangunan / penggalan di area yang sama dengan lintasan fiber dan kejadian force majeure lain	- Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE	1. Terhambatnya layanan perkantoran dengan menggunakan jaringan internet 2. Terhambatnya sistem layanan perkantoran yang menggunakan aplikasi	1. Layanan Organisasi; 2. Kinerja; 3. Operasional dan Aset TIK

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
					3. Layanan Organisasi terganggu 4. Mengganggu kinerja layanan 5. Operasional dan Aset TIK terganggu	
Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	4. Adanya Vulnerability Infrastruktur dan aplikasi Pusat Data	1. Tidak dilakukan proses verifikasi kelayakan aplikasi sebelum dihosting pada pusat komputasi 2. Dokumentasi aplikasi belum lengkap	- Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE	1. Terhambatnya sistem layanan perkantoran yang menggunakan aplikasi 2. Layanan Organisasi terganggu 3. Mengganggu kinerja layanan 4. Operasional dan Aset TIK terganggu	1. Layanan Organisasi; 2. Kinerja; 3. Operasional dan Aset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	5. Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	1. Keamanan aplikasi tidak termonitor 2. Terjadi celah akses informasi 3. Mal Konfigurasi	- Aplikasi SPBE - Layanan SPBE - Keamanan SPBE - Data dan Informasi - Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Bisnis	1. Kehilangan data 2. Kerusakan Aplikasi 3. Proses Bisnis Terhenti 4. Pemborosan anggaran	1. Finansial 2. Kinerja 3. Layanan Organisasi 4. Operasional dan Aset TIK

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
				- Kepatuhan terhadap aturan		
Domain Layanan SPBE	Negatif	6. Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	1. Terjadi pergantian pengelola aplikasi	- Aplikasi SPBE - Layanan SPBE - Keamanan SPBE - Data dan Informasi - Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Bisnis - Kepatuhan terhadap aturan	1. Kerusakan Aplikasi 2. Proses Bisnis Terhenti 3. Pemborosan anggaran	1. Finansial 2. Kinerja 3. Layanan Organisasi 4. Operasional dan Aset TIK
			2. Perubahan kebijakan	- Aplikasi SPBE - Layanan SPBE - Keamanan SPBE - Data dan Informasi - Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Bisnis - Kepatuhan terhadap aturan	Proses Bisnis Berubah	1. Kinerja 2. Layanan Organisasi 3. Operasional dan Aset TIK

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	7. Terhentinya proses pengembangan aplikasi	1. Kekurangan sumber daya untuk mengembangkan aplikasi	- Aplikasi SPBE - Layanan SPBE - Keamanan SPBE - Data dan Informasi - Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Bisnis - Kepatuhan terhadap aturan	1. Proses Bisnis Terhenti 2. Pemborosan anggaran	1. Finansial 2. Kinerja 3. Layanan Organisasi 4. Operasional dan Aset TIK
			2. Pergantian developer aplikasi	- Aplikasi SPBE - Layanan SPBE - Keamanan SPBE - Data dan Informasi - Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Bisnis - Kepatuhan terhadap aturan	1. Proses Bisnis Terhenti 2. Pemborosan anggaran	1. Finansial 2. Kinerja 3. Layanan Organisasi 4. Operasional dan Aset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	8. Aplikasi tidak dapat diakses	Gangguan pada Server Aplikasi	- Aplikasi SPBE - Layanan SPBE - Keamanan SPBE	1. Kehilangan data 2. Kerusakan Aplikasi	1. Finansial 2. Kinerja 3. Layanan

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
				<ul style="list-style-type: none"> - Bencana Alam - Data dan Informasi - Pengadaan Barang dan Jasa - Proses Bisnis - Kepatuhan terhadap aturan 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Proses Bisnis Terhenti 4. Pemborosan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi 4. Operasional dan Aset TIK
Domain Manajemen SPBE	Negatif	9. Terjadinya Kerusakan data	1. Penggunaan Komponen sistem informasi yang tidak uptodate/memiliki kerentanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya 	<ul style="list-style-type: none"> Operasional dan Aset TI Finansial Hukum dan Regulasi Layanan Organisasi
			2. Adanya SQL Injection dan/atau serangan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya 	<ul style="list-style-type: none"> Operasional dan Aset TI Finansial Hukum dan Regulasi Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			3. tidak melakukan patching pada kerentanan aplikasi	- Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE	1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya	Operasional dan Aset TI Finansial Hukum dan Regulasi Layanan Organisasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	10. Terjadinya Kehilangan data	1. Tidak melakukan patching pada kerentanan aplikasi	- Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE	1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya	Operasional dan Aset TI Finansial Hukum dan Regulasi Layanan Organisasi
			2. Adanya SQL Injection dan/atau serangan	- Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE	1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya	Operasional dan Aset TI Finansial Hukum dan Regulasi Layanan Organisasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	11. SDM Lambat dan SDM Malas	1. SDM tidak memiliki kompetensi	1. SDM SPBE 2. Proses Bisnis	1. Output tidak tercapai 2. kinerja organisasi	1. Reputasi Kinerja 2. layanan

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			2. Kurangnya pelatihan teknis	3. Inovasi 4. Layanan SPBE	menurun 3. Reputasi buruk	Organisasi 3. Operasional dan Aset TI 4. Sumber daya manusia
Domain Manajemen SPBE	Negatif	12. SDM Tidak Inovatif dan Tidak Sinergis	1. Penempatan pegawai tidak sesuai Peta Jabatan 2. Dokumen ABK tidak dievaluasi	1. SDM SPBE 2. Proses Bisnis 3. Inovasi 4. Layanan SPBE	1. Output tidak tercapai 2. kinerja organisasi menurun 3. Reputasi buruk	1. Reputasi Kinerja 2. layanan Organisasi 3. Operasional dan Aset TI 4. Sumber daya manusia
			1. Penempatan SDM tidak sesuai dengan kompetensi 2. Kurangnya pelatihan teknis	1. SDM SPBE 2. Proses Bisnis 3. Inovasi 4. Layanan SPBE	1. Output tidak tercapai 2. kinerja organisasi menurun 3. Reputasi buruk	1. Reputasi Kinerja 2. layanan Organisasi 3. Operasional dan Aset TI 4. Sumber daya manusia
Domain Manajemen SPBE	Negatif	13. Sulit dalam mengantisipasi perubahan	Tidak melakukan keseluruhan proses di Manajemen perubahan	1. Layanan SPBE 2. Kepatuhan terhadap Peraturan 3. Proses Bisnis	Kinerja organisasi menurun	1. Reputasi Kinerja 2. layanan Organisasi 3. Operasional dan

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
						Aset TI 4. Sumber daya manusia
Domain Manajemen SPBE	Negatif	14. Risiko tidak terkontrol	1. Kemungkinan risiko tidak terprediksi	1. Layanan SPBE 2. Kepatuhan terhadap Peraturan 3. Proses Bisnis	ketiadaan sumber daya, proses bisnis, dan monitoring penanganan manajemen risiko mengakibatkan risiko yang muncul tidak dapat diprediksi dan tidak tertangani	1. Reputasi Kinerja 2. layanan Organisasi 3. Operasional dan Aset TI 4. Sumber daya manusia

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1. Terkadang proses bisnis layanan terkendala	1. Evaluasi SPBE Kementerian di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT 2. Evaluasi terhadap aturan dan	Jarang terjadi	Risiko proses bisnis terkendala kurang dari 10%	Signifikan	Penurunan kinerja sekitar 60% s.d. 80%	13	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	kebijakan 3. Penyederhanaan proses bisnis 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan						
2. Masih ada praktik Calo, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pungutan Liar pada proses bisnis organisasi	1. Evaluasi SPBE Kementerian di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT 2. Evaluasi terhadap aturan dan kebijakan 3. Penyederhanaan proses bisnis 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan	Kadang-kadang terjadi	Risiko terhadap penyalahgunaan wewenang kurang dari 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
3. Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet sehingga Layanan SLA ISP belum terpenuhi	Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan	Kadang-kadang terjadi	Risiko akibat force majeure terjadi antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Karena berpengaruh kepada layanan organisasi, Kinerja, dan Operasional dan aset TIK sehingga menyebabkan	22	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%		
4. Adanya Vulnerability Infrastruktur dan aplikasi Pusat Data	Pelaksanaan Penetration Testing	Hampir pasti terjadi	Risiko akibat vulnerability infrastruktur terjadi lebih dari 50%	Sangat Signifikan	Karena berpengaruh kepada layanan organisasi, Kinerja, dan Operasional dan aset TIK sehingga menyebabkan penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	25	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
5. Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	1. Dilakukan IT Security Assesment (ITSA) 2. Monitoring DNS Server dan webservice 3. Monitoring Web Application Firewall	Kadang-kadang terjadi	Kejadian serangan siber terjadi antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Karena berpengaruh pada proses bisnis dan layanan SPBE mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
6. Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	Memperbaharui SLA	Kadang-kadang terjadi	Kejadian pergantian pengelola aplikasi antara 10% s.d. 20%	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	14	Sedang
	Menyusun proses bisnis baru	Kadang-kadang terjadi	Kejadian pergantian pengelola aplikasi antara 10% s.d. 20%	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	14	Sedang
7. Terhentinya proses pengembangan aplikasi	1. Menyusun pembagian tugas tim 2. Memberikan pelatihan untuk	Kadang-kadang terjadi	Kejadian terhentinya pengembangan	Signifikan	Penurunan kinerja sekitar 60% s.d. 80%	17	Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	meingkatkan kapasitas SDM 3. Menyusun anggaran		aplikasi antara 10% s.d. 20%				
	1. Menyusun tim developer	Hampir Tidak Terjadi	Kemungkinan terhentinya pengembangan aplikasi kurang dari 5%	Signifikan	Penurunan kinerja sekitar 60% s.d. 80%	8	Rendah
8. Aplikasi tidak dapat diakses	1. Monitoring DNS Server dan webservice 2. Monitoring Web Application Firewall	Kadang-kadang terjadi	Kejadian aplikasi tidak dapat diakses antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
9. Terjadinya Kerusakan data	Melakukan update pada komponen sistem informasi	Jarang terjadi	Kejadian kerusakan data antara 5% s.d. 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
	Pemasangan WAF pada server aplikasi	Jarang terjadi	Kejadian kerusakan data antara 5% s.d. 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai	21	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					lebih dari 80%		
	Patching aplikasi	Jarang terjadi	Kejadian kerusakan data antara 5% s.d. 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
10. Terjadinya Kehilangan data	Melakukan IT IT Security Assesment (ITSA)	Jarang terjadi	Kejadian kerusakan data antara 5% s.d. 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
	Pemasangan WAF pada server aplikasi	Jarang terjadi	Kejadian kerusakan data antara 5% s.d. 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
11. SDM Lambat dan SDM Malas	Menyelenggarakan Pelatihan Teknis	Kadang-kadang terjadi	Kejadian pegawai yang malas dan lambat antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai	22	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					lebih dari 80%		
12. SDM Tidak Inovatif dan Tidak Sinergis	Melakukan Evaluasi ABK Melakukan Evaluasi Peta Jabatan	Kadang-kadang terjadi	Kejadian pegawai yang tidak inovatif dan tidak sinergis antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
	Menyelenggarakan Pelatihan Teknis	Kadang-kadang terjadi	Kejadian pegawai yang tidak inovatif dan tidak sinergis antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
13. Sulit dalam mengantisipasi perubahan	Pemantauan terhadap penerapan Manajemen Perubahan	Hampir tidak terjadi	Kemungkinan tidak terlaksananya Manajemen Perubahan SPBE kurang dari 5%	Tidak signifikan	Apabila Manajemen Risiko tidak terlaksana, dampak penurunan kinerja kurang dari 20%	1	Rendah

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
14. Risiko tidak terkontrol	Menyusun kebijakan Manajemen Risiko	Sering Terjadi	Penanganan terhadap risiko yang terlaksana hanya 30%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	16	Tinggi

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
1. Terkadang proses bisnis layanan terkendala	1. Evaluasi SPBE Kementerian di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT 2. Evaluasi terhadap aturan dan kebijakan 3. Penyederhanaan proses bisnis 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan	Ya	125
2. Masih ada praktik Calo, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pungutan Liar pada proses bisnis organisasi	1. Evaluasi SPBE Kementerian di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT 2. Evaluasi terhadap aturan dan kebijakan	Ya	32

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
	3. Penyederhanaan proses bisnis 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan		
3. Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet sehingga Layanan SLA ISP belum terpenuhi	Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan	Ya	33
4. Adanya Vulnerability Infrastruktur dan aplikasi Pusat Data	Pelaksanaan Penetration Testing	Ya	1
5. Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	1. Dilakukan IT Security Assesment (ITSA) 2. Monitoring DNS Server dan webservice 3. Monitoring Web Application Firewall	Ya	34
6. Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	Memperbaharui SLA	Ya	103
	Menyusun proses bisnis baru	Ya	104
7. Terhentinya proses pengembangan aplikasi	1. Menyusun pembagian tugas tim	Ya	88
	2. Memberikan pelatihan untuk meingkatkan kapasitas SDM 3. Menyusun anggaran	Ya	
	1. Menyusun tim developer		146
8. Aplikasi tidak dapat diakses	1. Monitoring DNS Server dan webservice	Ya	35
	2. Monitoring Web Application Firewall		
9. Terjadinya Kerusakan data	Melakukan update pada komponen sistem informasi	Ya	46

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
	Pemasangan WAF pada server aplikasi	Ya	47
	Patching aplikasi	Ya	48
10. Terjadinya Kehilangan data	Melakukan IT IT Security Assesment (ITSA)	Ya	49
	Pemasangan WAF pada server aplikasi	Ya	50
11. SDM Lambat dan SDM Malas	Menyelenggarakan Pelatihan Teknis	Ya	36
12. SDM Tidak Inovatif dan Tidak Sinergis	Melakukan Evaluasi ABK	Ya	37
	Melakukan Evaluasi Peta Jabatan		
	Menyelenggarakan Pelatihan Teknis	Ya	38
13. Sulit dalam mengantisipasi perubahan	Pemantauan terhadap penerapan Manajemen Perubahan	Ya	168
14. Risiko tidak terkontrol	Menyusun kebijakan Manajemen Risiko	Ya	99

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
1. Terkadang proses bisnis layanan terkendala	125	Mitigasi Resiko	Menyusun Standar Kebijakan Layanan	Kebijakan terkait standar layanan	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
2. Masih ada praktik Calo, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pungutan Liar pada proses bisnis organisasi	32	Mitigasi Resiko	Sosialisasi dan kampanye terhadap kebijakan	Pemberian penghargaan dan hukuman dalam penyelenggaraan layanan	Jan - Des	Sub Bagian Kepegawaian
3. Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet sehingga Layanan SLA ISP belum terpenuhi	33	Mitigasi Resiko	1. Membuat Dokumen SLA 2. Membentuk Forum Komunikasi pengelola Infrastruktur TI 3. Melakukan FGD pengelola Infrastruktur TI	1. Dokumen SLA ISP 2. Dokumen SLA Pemeliharaan Infrastruktur	Jan - Des	Sub Bidang Pengamanan Data dan Jaringan
4. Adanya Vulnerability Infrastruktur dan aplikasi Pusat Data	1	Mitigasi Resiko	1. Membuat Dokumen SLA 2. Membentuk Forum Komunikasi pengelola Infrastruktur TI 3. Melakukan FGD pengelola Infrastruktur TI	1. Dokumen SLA ISP 2. Dokumen SLA Pemeliharaan Infrastruktur	Jan - Des	Sub Bidang Pengamanan Data dan Jaringan
5. Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	34	Mitigasi Resiko	1. Menyusun rencana ITSA dengan BSSN 2. Menindaklanjuti hasil Evaluasi SLA 3. Melakukan Optimalisasi Manajemen NOC	1. Dokumen Hasil ITSA BSSN 2. Dokumen SLA ISP 3. Dokumen SLA pembangunan	Jan - Des	Sub Bidang Pemeliharaan TI

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				Aplikasi 4. Dokumen Standar 5. Pengelolaan NOC		
6. Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	103	Mitigasi Risiko	1. Melakukan Evaluasi SLA 2. Menyusun SLA baru	1. Laporan Evaluasi SLA 2. Dokumen SLA	Jan - Des	Sub Bidang Pemeliharaan TI
	104	Mitigasi Risiko	1. Menyusun proses bisnis baru	1. Peta proses bisnis	Jan - Des	Sub Bidang Pemeliharaan TI
7. Terhentinya proses pengembangan aplikasi	88	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Pengelolaan Aplikasi	Kebijakan Manajemen Pengelolaan Aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
	146	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Pengelolaan Aplikasi	Kebijakan Manajemen Pengelolaan Aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
8. Aplikasi tidak dapat diakses	35	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Pengelolaan Aplikasi	Kebijakan Manajemen Pengelolaan Aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
9. Terjadinya Kerusakan data	46	Mitigasi Resiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Data	Kebijakan Manajemen Data	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
	47	Mitigasi Resiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Data	Kebijakan Manajemen Data	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
	48	Mitigasi Resiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Data	Kebijakan Manajemen Data	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
10. Terjadinya Kehilangan data	49	Mitigasi Resiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Data	Kebijakan Manajemen Data	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
	50	Mitigasi Resiko	Menyusun kebijakan tentang Manajemen Data	Kebijakan Manajemen Data	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
11. SDM Lambat dan SDM Malas	36	Mitigasi Resiko	Menyusun rencana peningkatan kompetensi Teknis SDM	Dokumen perencanaan pelatihan teknis	Jan - Des	Sub Bagian Kepegawaian
12. SDM Tidak Inovatif dan Tidak Sinergis	37	Mitigasi Resiko	Mengevaluasi dokumen ABK serta peta jabatan	Dokumen ABK Dokumen Peta Jabatan	Jan - Des	Sub Bagian Kepegawaian
	38	Mitigasi Resiko	Menyusun rencana peningkatan kompetensi Teknis SDM	Dokumen perencanaan pelatihan teknis	Jan - Des	Sub Bagian Kepegawaian

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
13. Sulit dalam mengantisipasi perubahan	168	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan Manajemen Perubahan	1. Laporan Evaluasi Manajemen Risiko 2. Dokumen Manajemen Risiko	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI
14. Risiko tidak terkontrol	99	Mitigasi Risiko	1. Melakukan evaluasi risiko 2. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko	1. Laporan Evaluasi Manajemen Risiko 2. Dokumen Manajemen Risiko	Jan - Des	Sub Bidang Standarisasi TI

2. Inspektorat Jenderal

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tugas UPR SPBE	Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Fungsi UPR SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Peningkatan Nilai Indeks Kepastian Hukum yang terintegrasi	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Domain Layanan SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Koordinator Risiko SPBE	1. Yayah Mariani (Sekretaris Inspektorat Jenderal) 2. Slamet Iman Santoso (Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan)
Pengelola Risiko SPBE	1. Wahyu Setiawan (Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi) 2. Nurmalasari (Plt. Sub Koordinator Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan I dan Sub Koordinator Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan II) 2. Brahmantya Puji (Plt. Sub Koordinator Pengaduan dan Sub Koordinator Hubungan Masyarakat)

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	1. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Pengaduan dan Gratifikasi	- Pengembangan sistem aplikasi Layanan Pengaduan dan Gratifikasi sebelumnya dilakukan oleh vendor/pihak ketiga dan tidak termasuk biaya pemeliharaan aplikasi, ketika pengembangan akan dilakukan berbenturan dengan kebijakan clearance pada pengelolaan Teknologi Informasi	Layanan SPBE	Sistem Pelaporan sesuai kebutuhan tidak dapat di kompiliasi sesuai harapan	Layanan Organisasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	2. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hukuman Disiplin	- Aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan dan Hukuman Disiplin sebelumnya dikembangkan oleh Vendor/Pihak Ketiga tanpa pembiayaan untuk pemeliharaan dan aplikasi tidak dapat dikembangkan kembali dikarenakan dalam proses menuju likuidasi menunggu pengembangan aplikasi baru selesai	Layanan SPBE	Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan tidak sesuai kebutuhan	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	3. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Survei Pengawasan	Aplikasi Layanan survei pengawasan tidak diketahui ataupun digunakan oleh satuan kerja	Layanan SPBE	Pelaksanaan Pengawasan masih dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi	Layanan Organisasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Pengaduan dan Gratifikasi	Pemutakhiran aplikasi pendukung layanan pengaduan untuk mengakomodir fitur yang dibutuhkan user dan stakeholder dalam membuat analisa dan laporan	Kadang-Kadang Terjadi	Kadang-Kadang Terjadi (Analisa dan Laporan yang dibutuhkan sesuai format dari stakeholder sehingga perlu dikonsepsi secara konvensional)	Signifikan	Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% (Pengelolaan Laporan sebagian masih dilakukan secara manual)	12	Sedang
2. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hukuman Disiplin	Pemutakhiran aplikasi pengawasan dengan basis data yang baru dengan menetapkan metode penginputan yang transaksional	Kadang-kadang Terjadi	Kadang-Kadang Terjadi (Penginputan data yang bersifat upload mengharuskan proses	Signifikan	Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% (Penginputan dokumen yang dilakukan oleh admin pusat	12	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
			transaksional oleh admin pusat)		dan memungkinkan admin satuan kerja untuk melakukan penundaan pelaporan)		
3. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Survei Pengawasan	Optimalisasi Layanan Survey pada Aplikasi yang aktif untuk dapat dilakukan pengembangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan user	Kadang-Kadang Terjadi	Kadang-Kadang Terjadi (Pengembangan Layanan Survey yang dilakukan secara mandiri)	Signifikan	Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% (Pengembangan mandiri terhambat dengan waktu pengerjaan dan sumber daya manusia)	12	Sedang

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
1. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Pengaduan dan Gratifikasi	Pemutakhiran aplikasi pendukung layanan pengaduan untuk mengakomodir fitur yang dibutuhkan user dan stakeholder dalam membuat analisa dan laporan	Ya	132

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
2. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hukuman Disiplin	Pemutakhiran aplikasi pengawasan dengan basis data yang baru dengan menetapkan metode penginputan yang transaksional	Ya	133
3. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Survei Pengawasan	Optimalisasi Layanan Survey pada Aplikasi yang aktif untuk dapat dilakukan pengembangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan user	Ya	134

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
1. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Pengaduan dan Gratifikasi	132	Mitigasi Risiko	Pengembangan aplikasi baru untuk mendukung layanan yang lebih optimal	Aplikasi E-MAWas	Januari - Agustus 2023	Inspektorat Jenderal
2. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hukuman Disiplin	133	Mitigasi Risiko	Pengembangan aplikasi baru untuk mendukung layanan yang lebih optimal	Aplikasi E-MAWas	Januari - Agustus 2023	Inspektorat Jenderal

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
3. Belum optimal perawatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Survei Pengawasan	134	Mitigasi Risiko	Peningkatan Pelaksanaan Survey secara berkala sebagai penunjang kebijakan pimpinan	Survey Internal dan Eksternal	Januari - Desember 2023	Inspektorat Jenderal

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Tugas UPR SPBE	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi UPR SPBE	<p>a. perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Terwujudnya Pelayanan Publik di bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Indeks domain layanan SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Teknologi Informasi
Pengelola Risiko SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tony Ferdianto, Koordinator Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras 2. Susi Liza Febriani, Koordinator Pengembangan Perangkat Lunak 3. Susan Sandra Indriati, Koordinator Tata Kelola TIK 4. Elmeran Marchello, Subkoordinator Pengembangan Jaringan dan Komunikasi Data 5. Anisa Siti Mukarromah, Subkoordinator Dukungan Teknis 6. Akbar Tri Kerstianto, Sukoordinator Pengembangan dan Perlindungan Basis Data 7. Wiliyanto Sinaga, Subkoordinator Pengembangan Perangkat Keras

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	1. Terganggunya Layanan Fidusia	1. Belum adanya Backup DRC pada Data Center Ditjen AHU menyebabkan apabila ada gangguan layanan pada DC AHU maka operasional DC akan terhenti	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			2. Belum ada batasan tanggungjawab yang jelas terhadap pengelolaan perangkat teknologi informasi antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat dikarenakan adanya kesimpangsiuran dalam pengelolaan perangkat teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			3. Pemahaman dan kualifikasi SDM yang belum maksimal terkait Data Center	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			4. Terjadi keterlambatan dalam perpanjangan lisensi perangkat dikarenakan terkendala proses clearance dan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi mengenai pencatatan masa berlakunya lisensi	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			5. Serangan siber terhadap aplikasi pelayanan	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
					Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	TIK 5. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	2. Terganggunya Layanan Badan Hukum	1. Belum adanya Backup DRC pada Data Center Ditjen AHU menyebabkan apabila ada gangguan layanan pada DC AHU maka operasional DC akan terhenti	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			2. Belum ada batasan tanggungjawab yang jelas terhadap pengelolaan perangkat teknologi informasi antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat dikarenakan adanya kesimpangsiuran dalam pengelolaan perangkat teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			3. Pemahaman dan kualifikasi SDM yang belum maksimal terkait Data Center	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			4. Terjadi keterlambatan dalam perpanjangan lisensi perangkat dikarenakan terkendala proses clearance dan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi mengenai pencatatan masa berlakunya lisensi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			5. Serangan siber terhadap aplikasi pelayanan	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif		1. Belum adanya Backup DRC pada Data Center Ditjen AHU menyebabkan	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		3. Terganggunya Layanan SIMPADHU	apabila ada gangguan layanan pada DC AHU maka operasional DC akan terhenti		Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			2. Belum ada batasan tanggungjawab yang jelas terhadap pengelolaan perangkat teknologi informasi antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat dikarenakan adanya kesimpangsiuran dalam pengelolaan perangkat teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			3. Pemahaman dan kualifikasi SDM yang belum maksimal terkait Data Center	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			4. Terjadi keterlambatan dalam perpanjangan lisensi perangkat dikarenakan terkendala proses clearance dan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi mengenai pencatatan masa berlakunya lisensi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			5. Serangan siber terhadap aplikasi pelayanan	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjen AHU Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	4. Terganggunya Layanan Legalisasi/APOSTI LLE	1. Belum adanya Backup DRC pada Data Center Ditjen AHU menyebabkan apabila ada gangguan layanan pada DC AHU maka operasional DC akan terhenti	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			2. Belum ada batasan tanggungjawab yang jelas terhadap pengelolaan perangkat teknologi informasi antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat dikarenakan adanya kesimpangsiuran dalam pengelolaan perangkat teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai antara Direktorat Teknologi Informasi dengan Sekretariat	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			3. Pemahaman dan kualifikasi SDM yang belum maksimal terkait Data Center	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			4. Terjadi keterlambatan dalam perpanjangan lisensi perangkat dikarenakan terkendala proses clearance dan belum adanya sistem	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			pencatatan yang terintegrasi mengenai pencatatan masa berlakunya lisensi		maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi
			5. Serangan siber terhadap aplikasi pelayanan	Layanan SPBE	Penyelesaian masalah perangkat teknologi informasi user tidak dapat ditangani secara maksimal Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. SDM 4. Operasional dan Aset TIK 5. Layanan Organisasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1. Terganggunya Layanan Fidusia	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	1. Jarang terjadi	1. DC mati karena gangguan operasional selain karena alasan maintenance antara 2 < x < 5 kali dalam setahun	1. Sangat signifikan	1. Jika DC mati maka seluruh operasional layanan aplikasi akan terhenti secara total	21	Sangat Tinggi
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	2. Hampir tidak terjadi	2. Pencatatan aset BMN dan TI telah didukung sistem dan telah dikoordinasikan	2. Cukup signifikan	2. Risiko penurunan kinerja karena masalah pengelolaan aset s.d 40%	5	Sangat Rendah
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	3. Kadang-kadang terjadi	3. Belum seluruh pegawai mendapatkan sertifikasi dan pegawai yang telah mendapat pelatihan belum seluruhnya lulus ujian sertifikasi	3. Cukup signifikan	3. Lambatnya penanganan masalah pada Data Center karena kurangnya kompetensi pegawai	14	Sedang
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak	4. Kadang-kadang terjadi	4. Proses pengajuan izin non PDN tidak seluruhnya disetujui	4. Cukup signifikan	4. Izin non PDN yang terlambat dapat menghambat proses	14	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN				pengadaan dan penurunan kinerja penyerapan		
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	5. Kadang-kadang terjadi	5. Sekitar 20% serangan siber tidak terprediksi dan belum dapat dikategorisasikan	5. Cukup signifikan	5. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	14	Sedang
2. Terganggunya Layanan Badan Hukum	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	1. Jarang terjadi	1. DC mati karena gangguan operasional selain karena alasan maintenance antara 2 < x < 5 kali dalam setahun	1. Sangat signifikan	1. Jika DC mati maka seluruh operasional layanan aplikasi akan terhenti secara total	21	Sangat Tinggi
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	2. Hampir tidak terjadi	2. Pencatatan aset BMN dan TI telah didukung sistem dan telah dikoordinasikan	2. Cukup signifikan	2. Risiko penurunan kinerja karena masalah pengelolaan aset s.d 40%	5	Sangat Rendah
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama	3. Kadang-kadang terjadi	3. Belum seluruh pegawai mendapatkan sertifikasi dan pegawai yang telah mendapat	3. Cukup signifikan	3. Lambatnya penanganan masalah pada Data Center karena kurangnya kompetensi pegawai	14	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	pegawai yang menangani Data Center		pelatihan belum seluruhnya lulus ujian sertifikasi				
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN	4. Kadang-kadang terjadi	4. Proses pengajuan izin non PDN tidak seluruhnya disetujui	4. Cukup signifikan	4. Izin non PDN yang terlambat dapat menghambat proses pengadaan dan penurunan kinerja penyerapan	14	Sedang
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	5. Kadang-kadang terjadi	5. Sekitar 20% serangan siber tidak terprediksi dan belum dapat dikategorisasikan	5. Cukup signifikan	5. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	14	Sedang
3. Terganggunya Layanan SIMPADHU	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	1. Jarang terjadi	1. DC mati karena gangguan operasional selain karena alasan maintenance antara 2 < x < 5 kali dalam setahun	1. Sangat signifikan	1. Jika DC mati maka seluruh operasional layanan aplikasi akan terhenti secara total	21	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	2. Hampir tidak terjadi	2. Pencatatan aset BMN dan TI telah didukung sistem dan telah dikoordinasikan	2. Cukup signifikan	2. Risiko penurunan kinerja karena masalah pengelolaan aset s.d 40%	5	Sangat Rendah
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	3. Kadang-kadang terjadi	3. Belum seluruh pegawai mendapatkan sertifikasi dan pegawai yang telah mendapat pelatihan belum seluruhnya lulus ujian sertifikasi	3. Cukup signifikan	3. Lambatnya penanganan masalah pada Data Center karena kurangnya kompetensi pegawai	14	Sedang
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN	4. Kadang-kadang terjadi	4. Proses pengajuan izin non PDN tidak seluruhnya disetujui	4. Cukup signifikan	4. Izin non PDN yang terlambat dapat menghambat proses pengadaan dan penurunan kinerja penyerapan	14	Sedang
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	5. Kadang-kadang terjadi	5. Sekitar 20% serangan siber tidak terprediksi dan belum dapat dikategorisasikan	5. Cukup signifikan	5. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	14	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
4. Terganggunya Layanan Legalisasi/APOS TILLE	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	1. Jarang terjadi	1. DC mati karena gangguan operasional selain karena alasan maintenance antara 2 < x < 5 kali dalam setahun	1. Sangat signifikan	1. Jika DC mati maka seluruh operasional layanan aplikasi akan terhenti secara total	21	Sangat Tinggi
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	2. Hampir tidak terjadi	2. Pencatatan aset BMN dan TI telah didukung sistem dan telah dikoordinasikan	2. Cukup signifikan	2. Risiko penurunan kinerja karena masalah pengelolaan aset s.d 40%	5	Sangat Rendah
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	3. Kadang-kadang terjadi	3. Belum seluruh pegawai mendapatkan sertifikasi dan pegawai yang telah mendapat pelatihan belum seluruhnya lulus ujian sertifikasi	3. Cukup signifikan	3. Lambatnya penanganan masalah pada Data Center karena kurangnya kompetensi pegawai	14	Sedang
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan	4. Kadang-kadang terjadi	4. Proses pengajuan izin non PDN tidak seluruhnya disetujui	4. Cukup signifikan	4. Izin non PDN yang terlambat dapat menghambat proses pengadaan dan penurunan kinerja penyerapan	14	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN						
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	5. Kadang-kadang terjadi	5. Sekitar 20% serangan siber tidak terprediksi dan belum dapat dikategorisasikan	5. Cukup signifikan	5. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	14	Sedang

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
1. Terganggunya Layanan Fidusia	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	Ya	51
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	Ya	157
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	Ya	105
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN	Ya	106

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	Ya	107
2. Terganggunya Layanan Badan Hukum	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	Ya	52
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	Ya	158
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	Ya	108
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN	Ya	109
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	Ya	110
3. Terganggunya Layanan SIMPADHU	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	Ya	53
	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	Ya	159
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	Ya	111
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN	Ya	112
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	Ya	113
	1. Koordinasi terkait pemindahan layanan ke PDN	Ya	54

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
4. Terganggunya Layanan Legalisasi/APOSTILLE	2. Koordinasi terkait pencatatan pengelolaan aset antara BMN dan Operasional TIK	Ya	160
	3. Diselenggarakan sertifikasi teknis CDCP (Certified Data Center Professional) untuk sebagian pegawai operasional Direktorat TI terutama pegawai yang menangani Data Center	Ya	114
	4. Koordinasi terkait clearance ke K/L terkait, mengajukan izin non PDN untuk lisensi yang belum disediakan di PDN dan tidak dimungkinkan untuk ditunda, serta melakukan pengadaan pra-DIPA untuk lisensi yang sudah mendapatkan izin non PDN	Ya	115
	5. Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing	Ya	116

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
1. Terganggunya Layanan Fidusia	51	1. Eskalasi Risiko	1. Follow up dan koordinasi lebih lanjut terkait pemindahan ke PDN. Melakukan penyusunan business continuity plan (BCP)	1. Dokumen BCP	Jan-Des	Direktorat TI
	157	2. Penghindaran Risiko	2. Prioritas penggunaan aset yang sudah jelas tanggung jawabnya, koordinasi untuk penggunaan aset yang masih belum tercatat	2. Catatan aset baik berupa dokumen maupun tercatat di aplikasi	Jan-Des	Direktorat TI

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
	105	3. Mitigasi Risiko	3. Pemberian pelatihan dan sertifikasi secara bertahap kepada pegawai operasional	3. Sertifikasi pelatihan pegawai	Jan-Des	Direktorat TI
	106	4. Mitigasi Risiko	4. Mendorong untuk izin non PDN agar segera terlaksana	4. Dokumen izin non PDN	Jan-Des	Direktorat TI
	107	5. Mitigasi Risiko	5. Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	5. Laporan Preventive maintenance 6. Laporan Corrective maintenance 7. Laporan Pemeliharaan	Jan-Des	Direktorat TI
2. Terganggunya Layanan Badan Hukum	52	1. Eskalasi Risiko	1. Follow up dan koordinasi lebih lanjut terkait pemindahan ke PDN. Melakukan penyusunan business continuity plan (BCP)	1. Dokumen BCP	Jan-Des	Direktorat TI
	158	2. Penghindaran Risiko	2. Prioritas penggunaan aset yang sudah jelas tanggung jawabnya, koordinasi untuk penggunaan aset yang masih belum tercatat	2. Catatan aset baik berupa dokumen maupun tercatat di aplikasi	Jan-Des	Direktorat TI
	108	3. Mitigasi Risiko	3. Pemberian pelatihan dan sertifikasi secara bertahap kepada pegawai operasional	3. Sertifikasi pelatihan pegawai	Jan-Des	Direktorat TI
	109	4. Mitigasi Risiko	4. Mendorong untuk izin non PDN agar segera terlaksana	4. Dokumen izin non PDN	Jan-Des	Direktorat TI

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
	110	5. Mitigasi Risiko	5. Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	5. Laporan Preventive maintenance 6. Laporan Corrective maintenance 7. Laporan Pemeliharaan	Jan-Des	Direktorat TI
3. Terganggunya Layanan SIMPADHU	53	1. Eskalasi Risiko	1. Follow up dan koordinasi lebih lanjut terkait pemindahan ke PDN. Melakukan penyusunan business continuity plan (BCP)	1. Dokumen BCP	Jan-Des	Direktorat TI
	159	2. Penghindaran Risiko	2. Prioritas penggunaan aset yang sudah jelas tanggung jawabnya, koordinasi untuk penggunaan aset yang masih belum tercatat	2. Catatan aset baik berupa dokumen maupun tercatat di aplikasi	Jan-Des	Direktorat TI
	111	3. Mitigasi Risiko	3. Pemberian pelatihan dan sertifikasi secara bertahap kepada pegawai operasional	3. Sertifikasi pelatihan pegawai	Jan-Des	Direktorat TI
	112	4. Mitigasi Risiko	4. Mendorong untuk izin non PDN agar segera terlaksana	4. Dokumen izin non PDN	Jan-Des	Direktorat TI
	113	5. Mitigasi Risiko	5. Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	5. Laporan Preventive maintenance 6. Laporan	Jan-Des	Direktorat TI

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				Corrective maintenance 7. Laporan Pemeliharaan		
4. Terganggunya Layanan Legalisasi/APOSTILLE	54	1. Eskalasi Risiko	1. Follow up dan koordinasi lebih lanjut terkait pemindahan ke PDN. Melakukan penyusunan business continuity plan (BCP)	1. Dokumen BCP	Jan-Des	Direktorat TI
	160	2. Penghindaran Risiko	2. Prioritas penggunaan aset yang sudah jelas tanggung jawabnya, koordinasi untuk penggunaan aset yang masih belum tercatat	2. Catatan aset baik berupa dokumen maupun tercatat di aplikasi	Jan-Des	Direktorat TI
	114	3. Mitigasi Risiko	3. Pemberian pelatihan dan sertifikasi secara bertahap kepada pegawai operasional	3. Sertifikasi pelatihan pegawai	Jan-Des	Direktorat TI
	115	4. Mitigasi Risiko	4. Mendorong untuk izin non PDN agar segera terlaksana	4. Dokumen izin non PDN	Jan-Des	Direktorat TI
	116	5. Mitigasi Risiko	5. Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	5. Laporan Preventive maintenance 6. Laporan Corrective maintenance 7. Laporan Pemeliharaan	Jan-Des	Direktorat TI

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Tugas UPR SPBE	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi UPR SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan; 3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan; 4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya nilai indeks SPBE Kementerian Hukum dan HAM / Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE
		Domain Layanan SPBE
		Domain Manajemen SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Direktur Jenderal Pemasarakatan
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama
Pengelola Risiko SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi 2. Koordinator Pengamanan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi 3. Koordinator Data dan Informasi 4. Subkoo Perancangan Teknologi Informasi 5. Subkoo Pengembangan Teknologi Informasi 6. Subkoo Pengamanan Teknologi Informasi 7. Subkoo Pemeliharaan Teknologi Informasi 8. Subkoo Pertukaran Data dan Informasi 9. Subkoo Analisis Data dan Informasi

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	Aplikasi layanan tidak dapat diakses	Power failure di pusat data	Aplikasi SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja
			Gangguan jaringan internet pusat data	Aplikasi SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Akses secara ilegal	Kesalahan pemberian hak akses	Aplikasi SPBE	Potensi manipulasi data	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
			Sharing akun	Aplikasi SPBE	Potensi manipulasi data	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
			Manajemen password aplikasi lemah	Aplikasi SPBE	Potensi manipulasi data	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kerusakan perangkat lunak/aplikasi layanan	kurangnya pemeliharaan aplikasi	Aplikasi SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	Peretasan pada aplikasi layanan	Terdapat celah pada aplikasi	Aplikasi SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi SDP - Munculnya berita viral yang dapat merusak citra organisasi	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
			Pengembangan aplikasi tidak selalu menerapkan pengujian keamanan informasi	Aplikasi SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi SDP - Munculnya berita viral yang dapat merusak citra organisasi	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Bug pada aplikasi	Kurangnya pengecekan pada uji fungsi aplikasi	Aplikasi SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp	Layanan organisasi Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kerusakan perangkat keras pendukung layanan	pengaruh usia perangkat	Infrastruktur SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja
			Kurangnya pemeliharaan perangkat	Infrastruktur SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Peretasan pada server aplikasi layanan	Kurangnya pengamanan server di pusat data	Infrastruktur SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi SDP - Potensi bocornya data organisasi	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
					- Potensi hilangnya data organisasi	
Domain Layanan SPBE	Negatif	Pegawai lambat dalam menangani layanan	Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM	SDM SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan organisasi Kinerja Reputasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terdapat laporan masalah dari pengguna yang berulang	Penanganan sebelumnya belum selesai sampai ke akar masalah & kurangnya pemahaman si pelapor insiden	SDM SPBE	- Terganggunya kegiatan dan layanan pada aplikasi sdp - Menurunnya kinerja organisasi	Layanan Organisasi Kinerja Reputasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kebocoran informasi sensitif	Celah pada sistem database (database outdated, dll)	Data dan Informasi	- Munculnya berita yang dapat merusak citra organisasi	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Data inputan tidak valid	Human error dan kurangnya integritas pegawai	Data dan Informasi	- Layanan terganggu - Organisasi tidak memiliki data yang dapat dijadikan pembuatan kebijakan	Layanan Organisasi Operasional dan aset TIK Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kehilangan / kerusakan data	Tidak dilakukan backup secara berkala	Data dan Informasi	- Kehilangan data penting organisasi - Reputasi	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	Proses layanan tidak sesuai prosedur	Pelaksanaan layanan TI tidak memiliki standar layanan	Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan tidak sesuai prosedur - adanya komplain - reputasi yang menurun karena layanan menyangkut hak narapidana 	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
			Layanan sudah memiliki prosedur namun belum kurang sosialisasi	Proses bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan tidak sesuai prosedur - adanya komplain - reputasi yang menurun karena layanan menyangkut hak narapidana 	Layanan organisasi Kinerja Hukum dan Regulasi
Domain Kebijakan SPBE	Negatif	Kebijakan SPBE Nasional dan Kumham belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai Ditjen PAS	Blum adanya sosialisasi terkait kebijakan SPBE nasional dan SPBE Kemenkumham	-Rencana Induk SPBE Nasional	- Potensi SPBE tidak berjalan dengan baik di Pemasyarakatan	Kinerja Layanan Organisasi
Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	Pengembangan TI Ditjen PAS kurang selaras dengan tujuan organisasi	Cetak Biru dan Roadmap TI habis masa periodenya	- Peta Rencana SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan TI tidak sesuai dengan tujuan organisasi - Ada kebutuhan TI yang tidak terakomodir 	Kinerja Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			Tidak ada enterprise arsitektur di Ditjen PAS	- Arsitektur SPBE	- Pembangunan TI yang tidak terpadu	Kinerja Layanan Organisasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Pengelolaan keamanan tidak sesuai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE atau standar keamanan informasi yang berlaku	Belum adanya standar dan prosedur keamanan informasi yang sesuai dengan pedoman ataupun standar yang berlaku	Keamanan SPBE	- Pengelolaan keamanan informasi tidak sesuai standar	Kinerja Layanan Organisasi
			Belum melakukan implementasi sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar	Keamanan SPBE	- Potensi ancaman terkait keamanan informasi bagi seluruh aset TI Ditjen PAS	Kinerja Layanan Organisasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Perubahan pada Teknologi informasi belum terdokumentasi	Tidak ada standar manajemen perubahan TI di Ditjen PAS	- Keamanan SPBE - Infrastruktur SPBE	- Tidak ada dokumentasi terkait perubahan - Perubahan tidak sesuai prioritas	Kinerja Layanan Organisasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Aset TI di Ditjen PAS belum dikelola dengan baik	Belum adanya manajemen aset TIK Ditjen PAS	- Keamanan SPBE	- Potensi kerusakan aset TI - Potensi kehilangan aset TI	Kinerja Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
				- Infrastruktur SPBE	- Proses pemeliharaan TI tidak sesuai	
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI Ditjen PAS	Manajemen SDM tidak dilakukan	- SDM SPBE	- SDM tidak memiliki kemampuan yang berakibat pada SPBE secara keseluruhan	Kinerja Layanan Organisasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Aplikasi layanan tidak dapat diakses	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan UPS pada pusat data - Testing UPS (namun tidak berkala) - Penyusunan BCP dan DRP - Pembuatan analisis kebutuhan DRC 	hampir tidak terjadi	Pernah terjadi >2 kali power failure pada periode tahun 2022 & 2023 yang menyebabkan gangguan pada aplikasi	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja >=80%	20	Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SLA jaringan internet dengan penyedia - Monitoring ketersediaan jaringan internet 	kadang-kadang terjadi	Berdasarkan data historis, terdapat lebih dari 6 kali kejadian gangguan jaringan internet selama 2022	signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% - Gangguan layanan berkepanjangan & sering terjadi gangguan 	17	Tinggi
Akses secara ilegal	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi manajemen user aplikasi layanan - Penerapan log login 	jarang terjadi	Prensetase kemungkinan sekitar 10%	signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% - Adanya potensi pelanggaran yang berpotensi memengaruhi organisasi - Ancaman pada data rahasia organisasi 	13	Sedang
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman penggunaan akun dan kata sandi - Sosialisasi terkait keamanan akun - penerapan log login pada aplikasi 	kadang-kadang terjadi	Persentase kemungkinan terjadi dalam satu tahun $10\% < X \leq 20\%$	signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% - Adanya potensi pelanggaran yang berpotensi memengaruhi organisasi 	17	Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					- Ancaman pada data rahasia organisasi		
	- Penyusunan pedoman penggunaan akun dan kata sandi - Sosialisasi terkait keamanan akun	kadang-kadang terjadi	Persentase kemungkinan terjadi dalam satu tahun $10\% < X \leq 20\%$	signifikan	- Penurunan Kinerja 60% s.d. <80% - Adanya pelanggaran yang berpotensi memengaruhi organisasi - Ancaman pada data rahasia organisasi	17	Tinggi
Kerusakan perangkat lunak/aplikasi layanan	- Monitoring aplikasi layanan (tidak rutin)	kadang-kadang terjadi	Terdapat beberapa kali kejadian kerusakan aplikasi	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$	22	Sangat Tinggi
Peretasan pada aplikasi layanan	- Pengujian keamanan aplikasi (tidak berkala)	jarang terjadi	Berdasarkan data historis tahunan, pernah terjadi peretasan namun frekuensi terjadi dalam setahun tidak lebih dari 5 kali	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$ - Ancaman pada data sangat rahasia organisasi	21	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	- Pengujian keamanan aplikasi (tidak berkala)	sering terjadi	Dari aplikasi yang dibuat di tahun berjalan, hampir 50% nya tidak dilakukan pengujian keamanan informasi	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja >=80% - Ancaman pada data sangat rahasia organisasi	24	Sangat Tinggi
Bug pada aplikasi	- uji fungsi aplikasi	sering terjadi	Dari aplikasi yang dibuat di tahun berjalan, hampir 50% nya tidak dilakukan pengujian keamanan informasi	cukup signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja >=80%	16	Tinggi
Kerusakan perangkat keras pendukung layanan	- pengecekan pada perangkat keras (namun tidak rutin, hanya insidentil)	sering terjadi	Setiap tahunnya, ada perangkat yang rusak karena usia perangkat	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja >=80%	24	Sangat Tinggi
	- pengecekan pada perangkat keras (namun tidak rutin, hanya insidentil)	sering terjadi	Setiap tahunnya, ada perangkat	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk	24	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
			yang rusak karena kurang dirawat		melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$		
Peretasan pada server aplikasi layanan	- Pengamanan dengan firewall - hardening server	jarang terjadi	Berdasarkan data historis tahunan, pernah terjadi peretasan namun frekuensi terjadi dalam setahun tidak lebih dari 5 kali	sangat signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$ - Ancaman pada data sangat rahasia organisasi	21	Sangat Tinggi
Pegawai lambat dalam menangani layanan	- pendampingan teknis aplikasi	kadang-kadang terjadi	Persentase kemungkinan terjadi dalam satu tahun $10\% < X \leq 20\%$	signifikan	- Menimbulkan berita buruk yang memengaruhi citra organisasi - Penurunan Kinerja 60% s.d. $< 80\%$	17	Tinggi
Terdapat laporan masalah dari pengguna yang berulang	- Penjelasan kepada pengguna	hampir pasti terjadi	Setiap tahun, terdapat lebih dari 12 kali kejadian laporan permasalahan	cukup signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. $< 60\%$	18	Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
			layanan yang berluang				
Kebocoran informasi sensitif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan dengan firewall - hardening server 	hampir tidak terjadi	Kebocoran informasi belum pernah terjadi, namun ancaman tetap selalu ada	sangat signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$ - Ancaman pada data sangat rahasia organisasi 	20	Tinggi
Data inputan tidak valid	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi terkait penginputan data pada aplikasi - Adanya surat pertanggung jawaban mutlak 	kadang-kadang terjadi	Persentase kemungkinan terjadi dalam satu tahun $10\% < X \leq 20\%$	sangat signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$ - Ancaman pada data sangat rahasia organisasi 	22	Sangat Tinggi
Kehilangan / kerusakan data	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan dengan firewall - hardening server - Backup data (tidak berkala) 	hampir tidak terjadi	Kebocoran informasi belum pernah terjadi, namun ancaman tetap selalu ada	sangat signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$ 	20	Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					- Ancaman pada data sangat rahasia organisasi		
Proses layanan tidak sesuai prosedur	- Koordinasi terkait SOP layanan dan penggunaan aplikasi layanan	kadang-kadang terjadi	Persentase kemungkinan terjadi dalam satu tahun $10% < X \leq 20%$	signifikan	- Menimbulkan berita butuk yang memengaruhi citra organisasi - Penurunan Kinerja 60% s.d. <80%	17	Tinggi
	- Sosialisasi ketika pendampingan teknis	kadang-kadang terjadi	Persentase kemungkinan terjadi dalam satu tahun $10% < X \leq 20%$	signifikan	- Menimbulkan berita butuk yang memengaruhi citra organisasi - Penurunan Kinerja 60% s.d. <80%	17	Tinggi
Kebijakan SPBE Nasional dan Kumham belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai Ditjen PAS	Sosialisasi terkait Kebijakan SPBE (1 kali di tahun 2022)	hampir pasti terjadi	Hampir sepenuhnya belum memahami terkait kebijakan SPBE nasional	cukup signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	18	Tinggi
	- pemetaan kebutuhan dan penyesuaian antara TI dan	sering terjadi		sangat signifikan	- Sasaran kinerja organisasi tidak	24	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Pengembangan TI Ditjen PAS kurang selaras dengan tujuan organisasi	organisasi - Pengaturan pengembangan aplikasi melalui standar perancangan dan pengembangan aplikasi Ditjen PAS - Surat edaran terkait pengembangan aplikasi				tepenuhi - Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$		
	- Pemetaan kondisi TI Ditjen PAS	sering terjadi		sangat signifikan	- Sasaran kinerja organisasi tidak tepenuhi - Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan kinerja $\geq 80\%$	24	Sangat Tinggi
Pengelolaan keamanan tidak sesuai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE atau standar keamanan informasi yang berlaku	- Pembuatan beberapa standar keamanan informasi	hampir pasti terjadi	Pengelolaan pengamanan sehari-hari selalu ada yang tidak sesuai dengan pedoman manajemen keamanan informasi	signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan Kinerja 40% s.d. <60% - ancaman terhadap data organisasi yang sangat rahasia	23	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	pemantauan implementasi dari standar yang sudah ada	hampir pasti terjadi	Pengelolaan pengamanan sehari-hari selalu ada yang tidak sesuai dengan pedoman manajemen keamanan informasi	signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan Kinerja 40% s.d. <60% - ancaman terhadap data organisasi yang sangat rahasia	23	Sangat Tinggi
Perubahan pada Teknologi informasi belum terdokumentasi	tidak ada kontrol	hampir pasti terjadi	Setiap ada perubahan dari TI baik dari aplikasi, selalu tidak didokumentasikan perubahannya	signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	23	Sangat Tinggi
Aset TI di Ditjen PAS belum dikelola dengan baik	- Pencatatan aset TI namun masih terpisah di beberapa file excel	sering terjadi	proses manajemen aset tidak dilakukan	signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan Kinerja 40% s.d. <60% - Ancaman terhadap data organisasi yang rahasia	19	Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI Ditjen PAS	- permohonan pelatihan SDM TI	hampir pasti terjadi	Setiap tahunnya, tidak pernah ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM TI	signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	23	Sangat Tinggi

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Aplikasi layanan tidak dapat diakses	- Penyediaan UPS pada pusat data - Testing UPS (namun tidak berkala) - Penyusunan BCP dan DRP - Pembuatan analisis kebutuhan DRC	Ya	72
	- Adanya SLA jaringan internet dengan penyedia - Monitoring ketersediaan jaringan internet	Ya	89
Akses secara ilegal	- Dokumentasi manajemen user aplikasi layanan - Penerapan log login	Ya	126
	- Penyusunan pedoman penggunaan akun dan kata sandi - Sosialisasi terkait keamanan akun - penerapan log login pada aplikasi	Ya	90
	- Penyusunan pedoman penggunaan akun dan kata sandi - Sosialisasi terkait keamanan akun	Ya	91

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Kerusakan perangkat lunak/aplikasi layanan	- Monitoring aplikasi layanan (tidak rutin)	Ya	39
Peretasan pada aplikasi layanan	- Pengujian keamanan aplikasi (tidak berkala)	Ya	55
	- Pengujian keamanan aplikasi (tidak berkala)	Ya	12
Bug pada aplikasi	- uji fungsi aplikasi	Ya	100
Kerusakan perangkat keras pendukung layanan	- pengecekan pada perangkat keras (namun tidak rutin, hanya insidental)	Ya	13
	- pengecekan pada perangkat keras (namun tidak rutin, hanya insidental)	Ya	14
Peretasan pada server aplikasi layanan	- Pengamanan dengan firewall - hardening server	Ya	56
Pegawai lambat dalam menangani layanan	- pendampingan teknis aplikasi	Ya	92
Terdapat laporan masalah dari pengguna yang berulang	- Penjelasan kepadap pengguna	Ya	83
Kebocoran informasi sensitif	- Pengamanan dengan firewall - hardening server	Ya	73
Data inputan tidak valid	- Sosialisasi terkait penginputan data pada aplikasi - Adanya surat pertanggung jawaban mutlak	Ya	40
Kehilangan / kerusakan data	- Pengamanan dengan firewall - hardening server - Backup data (tidak berkala)	Ya	74
Proses layanan tidak sesuai prosedur	- Koordinasi terkait SOP layanan dan penggunaan aplikasi layanan	Ya	93
	- Sosialisasi ketika pendampingan teknis	Ya	94
Kebijakan SPBE Nasional dan Kumham belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai Ditjen PAS	Sosialisasi terkait Kebijakan SPBE (1 kali di tahun 2022)	Ya	84

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Pengembangan TI Ditjen PAS kurang selaras dengan tujuan organisasi	- pemetaan kebutuhan dan penyesuaian antara TI dan organisasi - Pengaturan pengembangan aplikasi melalui standar perancangan dan pengembangan aplikasi Ditjen PAS - Surat edaran terkait pengembangan aplikasi	Ya	15
	- Pemetaan kondisi TI Ditjen PAS	Ya	16
Pengelolaan keamanan tidak sesuai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE atau standar keamanan informasi yang berlaku	- Pembuatan beberapa standar keamanan informasi	Ya	24
	pemantauan implementasi dari standar yang sudah ada	Ya	25
Perubahan pada Teknologi informasi belum terdokumentasi	tidak ada kontrol	Ya	26
Aset TI di Ditjen PAS belum terkelola dengan baik	- Pencatatan aset TI namun masih terpisah di beberapa file excel	Ya	80
Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI Ditjen PAS	- permohonan pelatihan SDM TI	Ya	27

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Aplikasi layanan tidak dapat diakses	72	Mitigasi	Koordinasi dengan bagian rumah tangga sekretariat terkait jadwal pemeliharaan UPS - Review BCP Ditjen PAS - Pembuatan DRC untuk backup layanan	Jadwal pemeliharaan UPS pusat data	Jan-Des	- Direktorat TI dan Kerja Sama - Sesditjen
	89	Sharing	- Monitoring SLA - Implementasi backup jaringan internet di pusat	- Laporan SLA - Implementasi backup jaringan yang berbeda ISP	Jan-Des	- Direktorat TI dan Kerja Sama - Penyedia Jasa Layanan Internet
Akses secara ilegal	126	Mitigasi	- Review user aplikasi layanan - Revisi hak akses user yang memeiliki kekeliruan	- Perbaikan hak akses user - penghapusan user yang sudah tida kaktif - hasil perbaikan hak akses suser	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
	90	Mitigasi	- Peningkatan kesadaran keamanan informasi pegawai pengguna aplikasi layanan - Sosialisasi kebijakan pedoman akun dan kata sandi Ditjen PAS	- Terselenggaranya kegiatan penguatan kesadaran	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				keamanan informasi - surat edaran terkait kesadaran keamanan informasi		
	91	Mitigasi	- Peningkatan kesadaran keamanan informasi pegawai pengguna aplikasi layanan - Sosialisasi kebijakan pedoman akun dan kata sandi Ditjen PAS	- Patch aplikasi terkait ketentuan password - Terselenggaranya kegiatan penguatan kesadaran keamanan informasi - surat edaran terkait kesadaran keamanan informasi	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Kerusakan perangkat lunak/aplikasi layanan	39	Mitigasi	- Dilakukan pemeliharaan aplikasi secara rutin - Review BCP Ditjen PAS	- Jadwal perawatan aplikasi	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
			- Pembuatan DRC untuk backup layanan	- Laporan perawatan aplikasi		
Peretasan pada aplikasi layanan	55	Mitigasi	- Pengujian keamanan pada aplikasi layanan - Perbaikan pada celah keamanan	- laporan pengujian keamanan - laporan perbaikan celah keamanan	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
	12	Mitigasi	- penyusunan prosedur pengamanan dalam pengembangan aplikasi	- Prosedur pengamanan pada pengembangan aplikasi	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Bug pada aplikasi	100	Mitigasi	- penyusunan prosedur pengamanan dalam pengembangan aplikasi - Perbaikan mekanisme testing/uji fungsi aplikasi	- Prosedur pengamanan pada pengembangan aplikasi - pengujian aplikasi yang lebih komprehensif	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Kerusakan perangkat keras pendukung layanan	13	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat prosedur terkait aset life cycle untuk proses manajemen aset TI - melakukan perbaikan mekanisme manajemen aset TI - Usulan penggantian perangkat yang sudah usang 	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur manajemen aset TI 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
	14	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pemeliharaan perangkat secara rutin - pembuatan mekanisme jadwal pemeliharaan perangkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal perawatan perangkat - laporan perawatan perangkat 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Peretasan pada server aplikasi layanan	56	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian keamanan pada server - perbaikan pada celah keamanan - Penambahan pengamanan pada server di pusat data (instalasi antivirus tambahan) - Instalasi firewall khusus server farm 	<ul style="list-style-type: none"> - laporan pengujian keamanan - laporan perbaikan celah keamanan 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Pegawai lambat dalam menangani layanan	92	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kompetensi pegawai - Rencana peningkatan kompetensi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemetaan kompetensi pegawai - Laporan 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				kegiatan peningkatan kompetensi		
Terdapat laporan masalah dari pengguna yang berulang	83	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan manual aplikasi layanan - sosialisasi manual aplikasi layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - manual aplikasi layanan - Laporan kegiatan sosialisasi manual aplikasi 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Kebocoran informasi sensitif	73	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian keamanan database - Perbaikan celah keamanan pada database 	<ul style="list-style-type: none"> - laporan pengujian keamanan - laporan perbaikan celah keamanan 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Data inputan tidak valid	40	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi surat pertanggung jawaban mutlak pada aplikasi layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan sosialisasi SPTJM 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Kehilangan / kerusakan data	74	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat prosedur backup rutin - melakukan backup rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - prosedur backup data secara rutin - hasil backup yang telah dilakukan 	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				- laporan hasil backup		
Proses layanan tidak sesuai prosedur	93	Mitigasi	- review standar layanan - Pembauatan standar layanan yang masih diperlukan	- hasil review standar layanan - standar layanan	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
	94	Mitigasi	- review standar yang telah dibuat - sosialisasi standar layanan	- kegiatan sosialisasi standar	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Kebijakan SPBE Nasional dan Kumham belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai Ditjen PAS	84	Sharing	Koordinasi dengan pusdatin terkait sosialisasi kebijakan SPBE Kumham	hasil kegiatan sosialisasi kebijakan spbe kumham	Jan-Des	- Direktoraat TI dan Kerja Sama - Pusdatin Kemenkumham
Pengembangan TI Ditjen PAS kurang selaras dengan tujuan organisasi	15	Mitigasi	- Pembuatan cetak biru dan roadmap TI	Cetak biru dan roadmap TI PAS	2022	Direktoraat TI dan Kerja Sama
	16	Mitigasi	- Pembautan enterprise arsitektur Ditjen PAS	Enterprise arsitektur Ditjen PAS	2022	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Pengelolaan keamanan tidak sesuai pedoman manajemen	24	Mitigasi	- Assesmen prosedur keamanan informasi - pembuatan standar keamanan informasi	- Kebijakan, standar, dan prosedur keamanan	Triwulan I 2023	Direktoraat TI dan Kerja Sama

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
keamanan informasi SPBE atau standar keamanan informasi yang berlaku	25	Mitigasi	- implementasi manajemen standar keamanan informasi yang telah dibuat	informasi - kegiatan pengamanan TI pada seluruh siklus Ditjen PAS	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Perubahan pada Teknologi informasi belum terdokumentasi	26	Mitigasi	- Pembuatan standar pengelolaan perubahan	- standar pengelolaan perubahan - Form request for change (RFC)	Triwulan I 2023	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Aset TI di Ditjen PAS belum terkelola dengan baik	80	Mitigasi	- pembuatan standar manajemen aset TI - Pengelolaan aset TI sesuai standar yang dibuat	- standar manajemen aset TI - Laporan pengelolaan aset	Jan-Des	Direktoraat TI dan Kerja Sama
Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI Ditjen PAS	27	Mitigasi	- Koordinasi dengan kepegawaian	- laporan hasil koordinasi	Jan-Des	- Direktoraat TI dan Kerja Sama - Seditjen

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Badan Pembinaan Hukum Nasional
Tugas UPR SPBE	Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Fungsi UPR SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana konsistensi penanganan Risiko SPBE; - Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum; - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum; - Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE
		Domain Layanan SPBE
		Domain Manajemen SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Kepala BPHN
Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris BPHN
Pengelola Risiko SPBE	Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	Aplikasi Crash/Down	Kinerja aplikasi yang buruk sehingga salah satunya load data lambat, dan adanya zombie process lalu menyebabkan resource exhausted dan aplikasi crash	Layanan SPBE	Proses reimbursement dana kegiatan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin terganggu	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Server Down	- Usia perangkat - kurangnya pemeliharaan - gangguan jaringan internet provider - Bencana Alam	Layanan SPBE	Proses reimbursement dana kegiatan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin terganggu	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Validitas data bantuan hukum	Data kegiatan pemberian bantuan hukum kurang akurat	Layanan SPBE	Akurasi Data	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional 5. Data dan Informasi

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Kurangnya Jumlah SDM dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem	Layanan SPBE	Ketergantungan terhadap satu pihak/vendor	1. Finansial 2. SDM 3. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Bugs pada aplikasi	Ketidaksesuaian hasil sistem informasi dengan expected result pada skenario proses bisnis	Layanan SPBE	Gangguan operasional	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Keamanan sistem yang belum teruji	Belum adanya proses Secure Development Life Cycle dan Penetration Test	Layanan SPBE	Potensi pencurian data	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Keamanan sistem yang belum teruji	-Belum adanya proses Secure Development Life Cycle dan Penetration Test	Layanan SPBE	Ada data penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum layak diketahui publik	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Aplikasi Crash/Down	Kinerja aplikasi yang buruk sehingga salah satunya load data lambat, dan adanya zombie process lalu menyebabkan resource exhausted dan aplikasi crash	Layanan SPBE	Proses pengajuan perencanaan RUU/RPP/RPerpres dan Monitoring Evaluasi Penyusunan RUU/RPP/RPerpres terhambat	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Kurangnya Jumlah SDM dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem	Layanan SPBE	Ketergantungan terhadap satu pihak, dan kurang responsive dalam pemutakhiran, pemeliharaan, dan pengembangan	1. Finansial 2. SDM 3. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	Bugs pada aplikasi	Belum proses SDLC yang baik, khususnya pada tahap Quality Assurance	Layanan SPBE	Gangguan proses bisnis perencanaan RUU/RPP/RPerpres	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	K/L Tidak melaporkan progres penyusunan RUU/RPP/RPerpres	K/L kurang disiplin melaporkan kondisi terkini penyusunan RUU/RPP/RPerpres	Layanan SPBE	Kurang validnya laporan progres penyusunan peraturan perundangan yang disampaikan ke presiden	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Operasional
Domain Layanan SPBE	Negatif	- Banyaknya pertanyaan/konsultasi dari masyarakat yang belum dijawab - Kurang akuratnya jawaban atas pertanyaan masyarakat	- Kurangnya jumlah konsultan (penyuluh hukum) yang melayani konsultasi - Kurang baiknya proses pemeriksaan jawaban di internal	Layanan SPBE	Citra organisasi	Reputasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Kurangnya Jumlah SDM dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem	Layanan SPBE	Tidak ada pemeliharaan dan pengembangan lagi pada aplikasi karena kurangnya pegawai dengan kompetensi TI dan kurangnya anggaran untuk menggunakan pihak ketiga	Operasional dan Aset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Keamanan sistem yang belum teruji	Belum adanya proses Secure Development Life Cycle dan Penetration Test	Layanan SPBE	Potensi pencurian data dan website defacement	Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Server Down	- Bencana alam - Kegagalan teknis (ex : konfigurasi, jaringan internet, jaringan listrik)	Layanan SPBE	Aplikasi tidak dapat diakses baik dari internal maupun publik	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Hukum dan Regulasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Aplikasi Crash/Down	Konfigurasi server yang tidak sesuai, kinerja aplikasi yang kurang baik	Layanan SPBE	- Tidak dapat mengakses dokumen/informasi hukum - Tidak dapat melakukan pembaruan dan pengelolaan data dokumen hukum	Kinerja
Domain Layanan SPBE	Negatif	Akses remote database	- Konfigurasi koneksi database yang tidak sesuai	Layanan SPBE	- Penyalahgunaan Data - Data tidak valid	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			- Penyalahgunaan akses aplikasi			3. Kinerja 4. Hukum dan Regulasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Keamanan sistem yang belum teruji	Belum adanya proses Secure Development Life Cycle dan Penetration Test Secara Berkala	Layanan SPBE	Terjadinya kerusakan sistem integrasi dokumen hukum	1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Hukum dan Regulasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Kompetensi SDM	Minimnya kompetensi SDM dalam melakukan perencanaan, pengerjaan, QA, dan evaluasi sistem termutakhir	Layanan SPBE	Ketergantungan terhadap satu pihak, dan kurang responsive dalam pemutakhiran, pemeliharaan, dan pengembangan	Operasional dan Aset TIK
Kebijakan SPBE	Negatif	Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	Tidak terdapatnya Unit Pengemban TI dengan Fungsi Kebijakan Strategis hanya terdapat SDM Teknis TI saja yang tersebar di beberapa Unit di BPHN dengan fokus terhadap tuisi masing-masing	Arsitektur SPBE	Potensi SPBE tidak berjalan	1. Hukum dan Regulasi 2. Layanan Organisasi 3. Kinerja
Tata Kelola SPBE	Negatif	Tidak terdapatnya Roadmap TI	Tidak terdapatnya Unit Pengemban TI dengan Fungsi Kebijakan Strategis hanya terdapat SDM Teknis TI saja yang tersebar di beberapa Unit di BPHN dengan fokus terhadap tuisi masing-masing	Peta Rencana SPBE	- Pengembangan TI tidak sesuai dengan tujuan organisasi - Ada kebutuhan TI yang tidak terakomodir - Tumbal sulam terhadap trouble yang berkaitan dengan TI	1. Kinerja 2. Layanan Organisasi
Tata Kelola SPBE	Negatif	Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	1. Pembangunan/penggalian di area yang sama dengan lintasan fiber dan kejadian force majeure lain 2. SLA dari ISP tidak terpenuhi karena kendala dari ISP	- Data dan informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE - Keamanan SPBE	1. Terhambatnya layanan perkantoran yang menggunakan layanan internet 2. Terhambatnya sistem layanan perkantoran yang menggunakan aplikasi 3. Layanan organisasi terganggu	1. Kinerja 2. Layanan organisasi 3. Operasional dan asset TIK

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
				- Layanan SPBE	4. Kinerja layanan terganggu 5. Operasional dan asset TIK terganggu	
Manajemen SPBE	Negatif	Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI	Manajemen SDM TI tidak dilakukan	SDM SPBE	SDM tidak memiliki kemampuan yang berakibat pada SPBE secara keseluruhan	1. Kinerja 2. Layanan Organisasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Aplikasi Crash/Down	Restart Application Server atau OS jika Aplikasi Down	Sering Terjadi	hampir terjadi 12 (dua belas) kali trouble dalam satu tahun	Sangat Signifikan	Karena berpengaruh terhadap proses bisnis pelaksanaan Bantuan Hukum tidak dapat dilakukan sama sekali	24	Sangat Tinggi
Server Down	Meminta bantuan Pusdatin Kemenkumham	Hampir Tidak Terjadi	1 Kali dalam satu tahun	Sangat Signifikan	Karena berpengaruh terhadap proses bisnis pelaksanaan Bantuan Hukum tidak dapat dilakukan sama sekali	20	Tinggi
Validitas data bantuan hukum	Pengolahan data secara manual terlebih dahulu untuk mendapatkan data bantuan hukum yang valid	Hampir Pasti Terjadi	Hampir terjadi setiap kali pengolahan rekapitulasi penerima Bantuan Hukum Litigasi dan	Kurang Signifikan	Karena berpengaruh terhadap Sebagian kecil rantai proses bisnis namun terdapat workaround	15	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
			Non-Litigasi yang didapatkan dari sistem belum final harus di olah secara manual				
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Melakukan koordinasi dengan SDM IT untuk mendampingi selama proses requirement gathering dan Testing bersama vendor	Hampir Pasti Terjadi	Selalu terjadi setiap terjadi bug/trouble/develop pengembangan fitur pada sisi aplikasi sesuai kebutuhan organisasi	Cukup Signifikan	Jumlah tenaga kerja yang berkompeten kurang namun pengelolaan SPBE tersendat namun output/outcome masih baik	18	Tinggi
Bugs pada aplikasi	Melakukan koordinasi dengan SDM IT untuk mendampingi selama proses requirement gathering dan Testing bersama vendor	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Tidak Signifikan	Tidak mengakibatkan penundaan aktivitas / waktu pengerjaan lebih lama	9	Rendah
Keamanan sistem yang belum teruji	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Security SidBankum dari network serta Vendor dari sisi aplikasi	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Sangat Signifikan	Menimbulkan pemberitaan buruk/viral atau berkurangnya kepercayaan terkait pelayanan	21	Sangat Tinggi
Keamanan sistem yang belum teruji	- Melakukan pengecekan berkala pada server untuk tracing kemungkinan adanya aksi penetrasi ke dalam sistem - Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Infra dan Security untuk Layanan Perencanaan Hukum Nasional (Sirenkum & E-Monev Legislasi)	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Sangat Signifikan	Menimbulkan pemberitaan buruk/viral atau berkurangnya kepercayaan terkait pelayanan	21	Sangat Tinggi
Aplikasi Crash/Down	-Restart Application Server atau OS jika Aplikasi Down	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Cukup Signifikan	Mengganggu sebagian beberapa	11	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Infra dan Security untuk Layanan Perencanaan Hukum Nasional (Sirekum & E-Monev Legislasi)				proses bisnis tetapi bisa digantikan dengan proses konvensional namun tidak signifikan mempengaruhi waktu pekerjaan		
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Infra dan Security untuk Layanan Perencanaan Hukum Nasional (Sirekum & E-Monev Legislasi) - Koordinasi terkait developing Sirekum dengan Pusdatin	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Cukup Signifikan	Jumlah tenaga kerja yang berkompeten kurang namun pengelolaan SPBE tersendat namun output/outcome masih baik	11	Sedang
Bugs pada aplikasi	Koordinasidengan Pusdatin terkait developing Sirekum dengan Pusdatin	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Cukup Signifikan	Mengganggu sebagian beberapa proses bisnis tetapi bisa digantikan dengan proses konvensional namun tidak signifikan mempengaruhi waktu pekerjaan	11	Sedang
K/L Tidak melaporkan progres penyusunan RUU/RPP/RPerpres	- Membuat Indeks Kinerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Tidak melaporkan progres penyusunan akan mempengaruhi Indeks Kinerja K/L. - Kinerja penyusunan K/L akan menjadi variable yang mempengaruhi persetujuan pengusulan penyusunan RUU/RPP/RPerpres oleh BPHN pada tahun berikutnya	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Cukup Signifikan	Kurang validnya laporan progres penyusunan peraturan perundang-undangan yang disampaikan ke presiden	11	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
- Banyaknya pertanyaan/konsultasi dari masyarakat yang belum dijawab - Kurang akuratnya jawaban atas pertanyaan masyarakat	Setiap jawaban dari penyuluh hukum harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pejabat setingkat Eselon II	Hampir pasti terjadi	Selalu terjadi pada setiap konsultasi Hukum pada aplikasi LSC	Cukup Signifikan	Mengakibatkan penundaan aktivitas / waktu pengerjaan lebih lama	18	Tinggi
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot LSC (Infra dan Security)	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Cukup Signifikan	Jumlah tenaga kerja yang berkompeten kurang namun pengelolaan SPBE tersendat namun output/outcome masih baik	11	Sedang
Keamanan sistem yang belum teruji	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot LSC (Infra dan Security)	Jarang Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Sangat Signifikan	Menimbulkan pemberitaan buruk/viral atau berkurangnya kepercayaan terkait pelayanan	21	Sangat Tinggi
Server Down	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security)	Hampir Tidak Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Signifikan	Karena berpengaruh terhadap Citra Organisasi dan Mengganggu kegiatan proses bisnis sehingga pekerjaan menjadi terhambat	8	Rendah
Aplikasi Crash/Down	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS	Hampir Tidak Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Signifikan	Karena berpengaruh terhadap Citra Organisasi dan Mengganggu kegiatan proses bisnis	8	Rendah

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					sehingga pekerjaan menjadi terhambat		
Akses remote database	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS - Melakukan pembatasan akses 	Hampir Tidak Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Signifikan	Karena berpengaruh terhadap Citra Organisasi dan Mengganggu kegiatan proses bisnis sehingga pekerjaan menjadi terhambat	8	Rendah
Keamanan sistem yang belum teruji	Melakukan pengajuan uji sistem pada BSSN untuk Penetration Test	Hampir Tidak Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Signifikan	Karena berpengaruh terhadap Citra Organisasi dan Mengganggu kegiatan proses bisnis sehingga pekerjaan menjadi terhambat	8	Rendah
Kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta bantuan Pusdatin Kemenkumham - Mengajukan pengembangan kompetensi melalui kursus dan sertifikasi 	Sering Terjadi	kurang dari 5 kali dalam setahun	Signifikan	Jumlah tenaga kerja yang berkompeten kurang namun pengelolaan SPBE tersendat namun output/outcome masih baik	16	Tinggi
Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	belum ada	hampir pasti terjadi	Hampir sepenuhnya belum memahami terkait kebijakan SPBE nasional	sangat signifikan	Tidak adanya komitmen dalam penerapan kebijakan	25	Sangat Tinggi
Tidak terdapatnya Roadmap TI	belum ada	hampir pasti terjadi	Hampir sepenuhnya belum memahami terkait kebijakan SPBE nasional	sangat signifikan	Tidak adanya komitmen dalam penerapan kebijakan	25	Sangat Tinggi
Terjadinya fiber cut dan/atau putus	Pemeliharaan infrastruktur jaringan	Jarang Terjadi	Risiko terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi	Kurang Signifikan	Mengakibatkan penundaan aktivitas /	7	Rendah

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
koneksi jaringan akses internet			jaringan akses internet antara 5% s.d. 10%		waktu pengerjaan tidak lama		
Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI	Permohonan pelatihan SDM TI	hampir pasti terjadi	Setiap tahunnya, tidak pernah ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM TI	signifikan	- Potensi ketidakmampuan untuk melanjutkan layanan - Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	23	Sangat Tinggi

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Aplikasi Crash/Down	Restart Application Server atau OS jika Aplikasi Down	Ya	17
Server Down	Meminta bantuan Pusdatin Kemenkumham	Ya	75
Validitas data bantuan hukum	Pengolahan data secara manual terlebih dahulu untuk mendapatkan data bantuan hukum yang valid	Ya	102
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Melakukan koordinasi dengan SDM IT untuk mendampingi selama proses requirement gathering dan Testing bersama vendor	Ya	85
Bugs pada aplikasi	Melakukan koordinasi dengan SDM IT untuk mendampingi selama proses requirement gathering dan Testing bersama vendor	ya	145
Keamanan sistem yang belum teruji	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Security SidBankum dari network serta Vendor dari sisi aplikasi	Ya	57
Keamanan sistem yang belum teruji	- Melakukan pengecekan berkala pada server untuk tracing kemungkinan adanya aksi penetrasi ke dalam sistem - Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Infra dan	Ya	58

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
	Security untuk Layanan Perencanaan Hukum Nasional (Sirenkum & E-Monev Legislasi)		
Aplikasi Crash/Down	-Restart Application Server atau OS jika Aplikasi Down - Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Infra dan Security untuk Layanan Perencanaan Hukum Nasional (Sirenkum & E-Monev Legislasi)	Ya	136
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot Infra dan Security untuk Layanan Perencanaan Hukum Nasional (Sirenkum & E-Monev Legislasi) - Koordinasi terkait developing Sirenkum dengan Pusdatin	Ya	137
Bugs pada aplikasi	Koordinasidengan Pusdatin terkait developing Sirenkum dengan Pusdatin	Ya	138
K/L Tidak melaporkan progres penyusunan RUU/RPP/RPerpres	- Membuat Indeks Kinerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Tidak melaporkan progres penyusunan akan mempengaruhi Indeks Kinerja K/L. - Kinerja penyusunan K/L akan menjadi variable yang mempengaruhi persetujuan pengusulan penyusunan RUU/RPP/RPerpres oleh BPHN pada tahun berikutnya	Ya	139
- Banyaknya pertanyaan/konsultasi dari masyarakat yang belum dijawab - Kurang akuratnya jawaban atas pertanyaan masyarakat	Setiap jawaban dari penyuluh hukum harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pejabat setingkat Eselon II	Tidak	86
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot LSC (Infra dan Security)	Ya	140
Keamanan sistem yang belum teruji	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot LSC (Infra dan Security)	Ya	59
Server Down	Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security)	Ya	147
Aplikasi Crash/Down	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS	Ya	148

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Akses remote database	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS - Melakukan pembatasan akses	Ya	149
Keamanan sistem yang belum teruji	Melakukan pengajuan uji sistem pada BSSN untuk Penetration Test	Ya	150
Kompetensi SDM	- Meminta bantuan Pusdatin Kemenkumham - Mengajukan pengembangan kompetensi melalui kursus dan sertifikasi	Ya	101
Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	belum ada	Ya	2
Tidak terdapatnya Roadmap TI	belum ada	Ya	3
Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	Pemeliharaan infrastruktur jaringan	Tidak	153
Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI	Permohonan pelatihan SDM TI	Ya	28

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Aplikasi Crash/Down	17	Mitigasi Risiko	Koordinasi dengan Pusdatin untuk Restart Application Server atau OS jika Aplikasi Down	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Server Down	75	Mitigasi Risiko	Koordinasi dengan Pusdatin untuk Restart Application Server atau OS jika Aplikasi Down	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Validitas data bantuan hukum	102	Mitigasi Risiko	Menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengembangan terkait normalisasi database SIDBankum untuk auto rekapitulasi data yang Valid	- Pembentukan Tim Teknis - Kontrak Kerja hasil Analisa Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	85	Mitigasi Risiko	Menggunakan jasa Pihak Ketiga serta melibatkan pemangku teknis TI di BPHN serta Pusdatin Kemenkumham	- Pembentukan Tim Teknis - Kontrak Kerja hasil Analisa Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Bugs pada aplikasi	145	Mitigasi Risiko	Menggunakan jasa Pihak ketiga	- Pembentukan Tim Teknis - Kontrak Kerja hasil Analisa Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Keamanan sistem yang belum teruji	57	Mitigasi Risiko	Menggunakan jasa Pihak Ketiga serta melibatkan pemangku teknis TI di BPHN serta Pusdatin Kemenkumham	- Pembentukan Tim Teknis - Kontrak Kerja hasil Analisa Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Keamanan sistem yang belum teruji	58	Mitigasi Risiko	Melibatkan pemangku teknis TI di BPHN serta Pusdatin Kemenkumham	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
Aplikasi Crash/Down	136	Mitigasi Risiko	Melibatkan pemangku teknis TI di BPHN serta Pusdatin Kemenkumham	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	137	Mitigasi Risiko	Meminta bantuan pusdatin untuk pengembangan dan pengelolaan infra salah satu sub sistem	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
Bugs pada aplikasi	138	Mitigasi Risiko	- Melakukan UAT dengan detail - Meminta bantuan pusdatin untuk pengembangan dan pengelolaan infra salah satu sub sistem	- Dokumen Hasil UAT serta Evaluasi UAT - Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
K/L Tidak melaporkan progres penyusunan RUU/RPP/RPerpres	139	Mitigasi Risiko	Sosialisasi kepada K/L	- Kegiatan Sosialisasi terkait Progress Pelaporan Penyusunan RUU/RPP/RPerpres yang di gagas oleh K/L - Dibentuknya SOP Reward/Punishment terkait Laporan Progress Penyusunan RUU/RPP/RPerpres yang di gagas oleh K/L	Jan - Des	PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
- Banyaknya pertanyaan/konsultasi dari masyarakat yang belum dijawab - Kurang akuratnya jawaban atas pertanyaan masyarakat	86	Mitigasi Risiko	Pembutan SOP untuk lebih cepat dalam menjawab pertanyaan Konsultasi Hukum	SOP terkait Menjawab Konsultasi Hukum via LSC	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Kurangnya Jumlah SDM yang memiliki kompetensi TI	140	Mitigasi Risiko	Menggunakan jasa Pihak Ketiga serta melibatkan pemangku teknis TI di BPHN serta Pusdatin Kemenkumham	-	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Keamanan sistem yang belum teruji	59	Mitigasi Risiko	Meminta bantuan pusdatin untuk security dalam sisi network dan infra	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
Server Down	147	Mitigasi Risiko	JDIHN bekerja sama dengan pusdatin, DJKI, DJPP untuk pengembangan dan pengelolaan infrastruktur JDIH.	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Aplikasi Crash/Down	148	Mitigasi Risiko	JDIHN bekerja sama dengan pusdatin, DJKI, DJPP untuk pengembangan dan pengelolaan infrastruktur JDIH.	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Akses remote database	149	Mitigasi Risiko	Meminta bantuan pusdatin untuk security dalam sisi network dan infra	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Keamanan sistem yang belum teruji	150	Mitigasi Risiko	Meminta bantuan pusdatin untuk security dalam sisi network dan infra	Pembentukan Tim Teknis	Jan - Des	PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Kompetensi SDM	101	Mitigasi Risiko	Melibatkan pemangku teknis TI di BPHN serta Pusdatin Kemenkumham	Koordinasi bersama unit terkait dan Pelatihan kemampuan teknis yang	Jan - Des	PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				dibutuhkan oleh SDM		
Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	2	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	BPHN
Tidak terdapatnya Roadmap TI	3	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	BPHN
Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	153	Mitigasi Risiko	1. Menyusun Dokumen SLA dan/atau melakukan evaluasi SLA 2. Melakukan komunikasi dengan ISP dan pemangku TI	Dokumen SLA ISP	Jan - Des	Bagian Umum Sekretariat BPHN
Belum adanya program peningkatan kompetensi SDM TI	28	Mitigasi Risiko	Koordinasi dengan Bagian Kepegawaian Sekretariat BPHN	Surat Pengajuan Pelatihan Kompetensi TI	Jan-Des	Bagian Kepegawaian Sekretariat BPHn

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Tugas UPR SPBE	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Fungsi UPR SPBE	a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya kualitas layanan informasi hukum dan ham yang terintegrasi	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE
Domain Layanan SPBE		
Domain Manajemen SPBE		
Terwujudnya Perumusan Kebijakan kementerian Hukum dan HAM Berbasis Riset		

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Kepala Balitbang Hukum dan HAM
Koordinator Risiko SPBE	Kepala Pusat Pengelola Data dan Informasi
Pengelola Risiko SPBE	- Koordinator Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Sub koordinator Bidang Teknologi Informasi - Sub Koordinator Bidang Sistem Informasi

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain layanan SPBE	Negatif	1. bocornya data responden dan hasil nilai survei yang bersifat rahasia	bug aplikasi, human error	Layanan SPBE Keamanan Data dan Informasi SDM SPBE	nilai survei bisa berubah, data responden terdublikasi	Layanan Organisasi
Domain layanan SPBE	Negatif	2. kebocoran data 3. masih banyak pengguna anonim.	bug aplikasi, open source system, update system	Layanan SPBE Keamanan Data dan Informasi Aplikasi SPBE	pencurian data karya tulis ilmiah/penduplikasian. Kerugian bagi penulis	Layanan Organisasi
Domain layanan SPBE	Negatif	4. pencurian hak cipta buku elektronik	file yang tidak terproteksi	Layanan SPBE Data dan Informasi Kepatuhan terhadap peraturan	pembajakan Karya Tulis Ilmiah	Layanan Organisasi
Domain layanan SPBE	Negatif	5. kesalahan dalam menganalisa data dan	bug aplikasi, trainer set dan data set yang tidak dimutakhirkan	Layanan SPBE	salah informasi	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		mempelajari permasalahan				
Domain tata Kelola SPBE	Negatif	6. Terjadinya putus koneksi pada jaringan lokal	Infrastruktur bangunan dan instalasi listrik yang sudah tua	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan SPBE - Layanan SPBE - Data dan Informasi - Infrastruktur SPBE - Aplikasi SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya layanan perkantoran dengan menggunakan jaringan internet 2. Terhambatnya sistem layanan perkantoran yang menggunakan aplikasi 3. Layanan Organisasi terganggu 4. Mengganggu kinerja layanan 5. Operasional dan Aset TIK terganggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Organisasi; 2. Kinerja; 3. Operasional dan Aset TIK
Domain Kebijakan SPBE	Negatif	7. Layanan tidak maksimal	Dokumen SOP SPBE belum disusun	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Bisnis - Layanan SPBE - Kepatuhan terhadap peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reputasi organisasi menjadi buruk 2. Layanan Organisasi tidak berjalan dengan baik 3. Kinerja tidak terukur 4. Sumber Daya Manusia tidak berkembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Organisasi 2. Reputasi 3. Kinerja 4. Sumber Daya Manusia
Domain Manajemen SPBE	Negatif	8. Kurangnya SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya atensi dan apresiasi pimpinan 2. SDM belum memiliki kompetensi yang sesuai 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Output tidak tercapai 2. kinerja organisasi menurun 3. Reputasi buruk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reputasi Kinerja 2. layanan Organisasi 3. Operasional dan Aset TI 4. Sumber daya manusia

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1. bocornya data responden dan hasil nilai survei yang bersifat rahasia	- Membuat kebijakan tentang penanggungjawab data - Monitoring database - SOP pemeliharaan data	Jarang terjadi	Kejadian Human error	Sangat signifikan	Karena berpengaruh pada proses bisnis dan layanan SPBE mencapai lebih dari 80%	21	Tinggi
2. kebocoran data 3. masih banyak pengguna anonim.	- Membuat kebijakan tentang penanggungjawab data - Monitoring database - SOP pemeliharaan data	Kadang-kadang Terjadi	Risiko akibat vulnerability infrastruktur dan data terjadi lebih dari 50%	Kurang Signifikan	Penurunan kualitas data	10	Sedang
4. pencurian hak cipta buku elektronik	Penggunaan Plagiarism Checker	kadang-kadang Terjadi	risiko terjadi 10% s.d. 20%	Kurang Signifikan	Penurunan kualitas data	10	Sedang
5. kesalahan dalam menganalisa data dan mempelajari permasalahan	Monitoring kualitas data	Sering terjadi	Resiko proses bisnis terkendala	Signifikan	Berpengaruh terhadap hasil analisa data	19	Sedang
6. Terjadinya putus koneksi pada jaringan lokal	Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan	Kadang-kadang Terjadi	Risiko akibat force majeure terjadi antara 20% s.d. 40%	Sangat signifikan	berpengaruh kepada layanan organisasi, Kinerja, dan Operasional dan aset TIK sehingga menyebabkan penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
7. Layanan tidak maksimal	1. Evaluasi SPBE 2. Evaluasi terhadap aturan dan kebijakan 3. Penyederhanaan proses	Jarang terjadi	Risiko proses bisnis terkendala kurang dari 10%	Signifikan	Penurunan kinerja sekitar 60% s.d. 80%	13	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	bisnis 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan						
8. Kurangnya SDM	1. Diselenggarakan Pelatihan Teknis 2. Dilakukan Evaluasi ABK 3. Dilakukan Evaluasi Peta Jabatan	Sering terjadi	1. Anggaran terbatas 2. Salah perhitungan ABK 3. Peta jabatan yang tidak dievaluasi	Sangat Signifikan	Karena berpengaruh pada reputasi dan kinerja organisasi	24	Sangat Tinggi

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
1. bocornya data responden dan hasil nilai survei yang bersifat rahasia	- Membuat kebijakan tentang penanggungjawab data - Monitoring database - SOP pemeliharaan data	Ya	60
2. kebocoran data 3. masih banyak pengguna anonim.	- Membuat kebijakan tentang penanggungjawab data - Monitoring database - SOP pemeliharaan data	Ya	143
4. pencurian hak cipta buku elektronik	Penggunaan Plagiarism Checker	Ya	144
5. kesalahan dalam menganalisa data dan mempelajari permasalahan	Monitoring kualitas data	Ya	81
6. Terjadinya putus koneksi pada jaringan lokal	Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan	Ya	41
7. Layanan tidak maksimal	1. Evaluasi SPBE 2. Evaluasi terhadap aturan dan kebijakan 3. Penyederhanaan proses bisnis 4. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan	Ya	127

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
8. Kurangnya SDM	1. Diselenggarakan Pelatihan Teknis 2. Dilakukan Evaluasi ABK 3. Dilakukan Evaluasi Peta Jabatan	Ya	18

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
1. bocornya data responden dan hasil nilai survei yang bersifat rahasia	60	Mitigasi resiko	- Melaksanakan Preventive dan Corrective maintenance - Memantau dan melaporkan seluruh aktifitas yang mencurigakan pada aplikasi	1. Pembentukan Tim Teknis 2. Log Maintenance dan Aktifitas User	Jan - Des	Sub Bidang Sistem Informasi
2. kebocoran data 3. masih banyak pengguna anonim.	143	Mitigasi resiko	Menyusun Dokumen SOP Pemeliharaan Data	Dokumen SOP Pemeliharaan Data	Jan-Des	Sub Bidang Sistem Informasi
4. pencurian hak cipta buku elektronik	144	Mitigasi resiko	1.Menggunakan lisensi 2.Menggunakan watermark	1. Dokumen kegiatan pengimplementasian watermark	Jan - Des	Bidang Publikasi
5. kesalahan dalam menganalisa data dan mempelajari permasalahan	81	Mitigasi resiko	1. Menetapkan kriteria dan standar Trainer set 2. Penggunaan algoritma yang tepat 3. Verifikasi hasil analisis	Data Analisis	Jan-Des	Sub Bidang Sistem Informasi

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
6. Terjadinya putus koneksi pada jaringan lokal	41	Mitigasi resiko	1. Membuat Dokumen SOP Infrastruktur dan Jaringan SPBE	Dokumen SOP Infrastruktur dan Jaringan SPBE	Jan-Des	Sub Bidang Teknologi Informasi
7. Layanan tidak maksimal	127	Mitigasi resiko	Menyusun Standar Kebijakan Layanan	Kebijakan terkait standar layanan	Jan-Des	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi
8. Kurangnya SDM	18	Mitigasi Resiko	Mengevaluasi dokumen ABK serta peta jabatan Menyusun rencana peningkatan kompetensi Teknis SDM	Dokumen ABK Dokumen Peta Jabatan Dokumen perencanaan pelatihan teknis	Jan - Des	Bagian Kepegawaian

7. Direktorat Jenderal Imigrasi

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Direktorat Jenderal Imigrasi
Tugas UPR SPBE	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi UPR SPBE	<ol style="list-style-type: none">a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan Teknologi informasi keimigrasian;b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;b) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri, keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;d) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dane) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Pengamanan negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta kemudahan dan fasilitasi Keimigrasian bagi investor asing pada pusat kegiatan strategis nasional pada wilayah perbatasan, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan perdagangan internasional.	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Domain Layanan SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Direktur Jenderal Imigrasi
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Pengelola Risiko SPBE	Koordinator Perencanaan dan Pengembangan SIMKIM Koordinator Pemeliharaan dan Pengamanan SIMKIM Koordinator Kerjasama Teknologi informasi Keimigrasian Koordinator Pengelolaan data dan Pelaporan Subkoordinator Perencanaan SIMKIM Subkoordinator Pengembangan SIMKIM Subkoordinator Pendayagunaan SIMKIM Subkoordinator Pemeliharaan dan Pengamanan Wil.I Subkoordinator Pemeliharaan dan Pengamanan Wil.II Subkoordinator Pemeliharaan dan Pengamanan Wil.III Subkoordinator Kerjasama TIK Keimigrasian

	Subkoordinator Pemanfaatan data Keimigrasian Subkoordinator Pengelolaan data Perlintasan Subkoordinator Pengelolaan data Dokumen Perjalanan Subkoordinator Pengelolaan Dtaa Wna
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	1. Hanya melayani pengajuan permohonan visa pada hari dan waktu kerja	Bug Aplikasi	Layanan SPBE	- Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim - Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBPN menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	2. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	Human Error	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBPN menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	3. Pemohon dan Penjamin mendapatkan notifikasi email tidak real time	Server Down (impact gangguan data center)	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBPN menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	4. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	- Bug Aplikasi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBPN menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			- Human Error	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Server Down (impact gangguan data center)	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	5. Belum tersedia layanan permohonan bagi CTKI baru	- Bug Aplikasi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Human Error	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Server Down (impact gangguan data center)	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	6. Belum tersedia layanan permohonan paspor hilang dan rusak	- Bug Aplikasi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			- Human Error	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Server Down (impact gangguan data center)	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	7. Pemohon mendapatkan notifikasi email tidak real time	- Bug Aplikasi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Human Error	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Server Down (impact gangguan data center)	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	8. Kurangnya tereduksi masyarakat akan jenis permohonan yang diajukan	- Bug Aplikasi	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi
			- Human Error	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
					Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	
			- Server Down (impact gangguan data center)	Layanan SPBE	Terganggunya layanan Teknologi informasi Ditjenim Tingkat kepuasan pengguna menurun PNBP menurun	1. Layanan Organisasi 2. Operasional dan Aset TIK 3. Layanan Organisasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
1. Hanya melayani pengajuan permohonan visa pada hari dan waktu kerja	Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Kadang-kadang terjadi	1. Masih perlu dilakukan pengembangan agar aplikasi yang digunakan lebih stabil	Cukup signifikan	1. Masih tetap bisa mengajukan permohonan walaupun dalam kondisi aplikasi tidak ideal	14	Sedang
2. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Kadang-kadang terjadi	2. HP pemohon tidak support, jaringan internet pemohon tidak lancar, tidak membaca panduan	Cukup signifikan	2. pemohon harus berkoordinasi dengan petugas melalui helpdesk atau membaca petunjuk penggunaan aplikasi	5	Sangat Rendah
3. Pemohon dan Penjamin mendapatkan	Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall	Kadang-kadang terjadi	3. perangkat di data center yang perlu di lakukan peremajaan dan penggunaan	Cukup signifikan	3. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	21	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
notifikasi email tidak real time	& monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN		PDN yang menambah alur koneksi data				
4. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Kadang-kadang terjadi	1. Masih perlu dilakukan pengembangan agar aplikasi yang digunakan lebih stabil	Cukup signifikan	1. Masih tetap bisa mengajukan permohonan walaupun dalam kondisi aplikasi tidak ideal	14	Sedang
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Kadang-kadang terjadi	2. HP pemohon tidak support, jaringan internet pemohon tidak lancar, tidak membaca panduan	Cukup signifikan	2. pemohon harus berkoordinasi dengan petugas melalui helpdesk atau membaca petunjuk penggunaan aplikasi	5	Sangat Rendah
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Kadang-kadang terjadi	3. perangkat di data center yang perlu di lakukan peremajaan dan penggunaan PDN yang menambah alur koneksi data	Cukup signifikan	3. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	21	Sangat Tinggi
5. Belum tersedia layanan permohonan bagi CTKI baru	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Kadang-kadang terjadi	1. Masih perlu dilakukan pengembangan agar aplikasi yang digunakan lebih stabil	Cukup signifikan	1. Masih tetap bisa mengajukan permohonan walaupun dalam kondisi aplikasi tidak ideal	14	Sedang
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Kadang-kadang terjadi	2. HP pemohon tidak support, jaringan internet pemohon tidak lancar, tidak membaca panduan	Cukup signifikan	2. pemohon harus berkoordinasi dengan petugas melalui helpdesk atau membaca petunjuk penggunaan aplikasi	5	Sangat Rendah

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Kadang-kadang terjadi	3. perangkat di data center yang perlu di lakukan peremajaan dan penggunaan PDN yang menambah alur koneksi data	Cukup signifikan	3. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	21	Sangat Tinggi
6. Belum tersedia layanan permohonan paspor hilang dan rusak	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Kadang-kadang terjadi	1. Masih perlu dilakukan pengembangan agar aplikasi yang digunakan lebih stabil	Cukup signifikan	1. Masih tetap bisa mengajukan permohonan walaupun dalam kondisi aplikasi tidak ideal	14	Sedang
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Kadang-kadang terjadi	2. HP pemohon tidak support, jaringan internet pemohon tidak lancar, tidak membaca panduan	Cukup signifikan	2. pemohon harus berkoordinasi dengan petugas melalui helpdesk atau membaca petunjuk penggunaan aplikasi	5	Sangat Rendah
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Kadang-kadang terjadi	3. perangkat di data center yang perlu di lakukan peremajaan dan penggunaan PDN yang menambah alur koneksi data	Cukup signifikan	3. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	21	Sangat Tinggi
7. Pemohon mendapatkan	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Kadang-kadang terjadi	1. Masih perlu dilakukan pengembangan agar aplikasi yang digunakan lebih stabil	Cukup signifikan	1. Masih tetap bisa mengajukan permohonan walaupun dalam kondisi aplikasi tidak ideal	14	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
notifikasi email tidak real time	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Kadang-kadang terjadi	2. HP pemohon tidak support, jaringan internet pemohon tidak lancar, tidak membaca panduan	Cukup signifikan	2. pemohon harus berkoordinasi dengan petugas melalui helpdesk atau membaca petunjuk penggunaan aplikasi	5	Sangat Rendah
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Kadang-kadang terjadi	3. perangkat di data center yang perlu di lakukan peremajaan dan penggunaan PDN yang menambah alur koneksi data	Cukup signifikan	3. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	21	Sangat Tinggi
8. Kurangnya tereduksi masyarakat akan jenis permohonan yang diajukan	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Kadang-kadang terjadi	1. Masih perlu dilakukan pengembangan agar aplikasi yang digunakan lebih stabil	Cukup signifikan	1. Masih tetap bisa mengajukan permohonan walaupun dalam kondisi aplikasi tidak ideal	14	Sedang
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Kadang-kadang terjadi	2. HP pemohon tidak support, jaringan internet pemohon tidak lancar, tidak membaca panduan	Cukup signifikan	2. pemohon harus berkoordinasi dengan petugas melalui helpdesk atau membaca petunjuk penggunaan aplikasi	5	Sangat Rendah
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug	Kadang-kadang terjadi	3. perangkat di data center yang perlu di lakukan peremajaan dan penggunaan PDN yang menambah alur koneksi data	Cukup signifikan	3. Penurunan kinerja karena terganggunya layanan disebabkan menangani serangan siber sekitar 40-60%	21	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	fixing dan pemindahan ke PDN						

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
1. Hanya melayani pengajuan permohonan visa pada hari dan waktu kerja	Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Ya	117
2. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Ya	161
3. Pemohon dan Penjamin mendapatkan notifikasi email tidak real time	Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Ya	61
4. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Ya	118
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Ya	162
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Ya	62

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
5. Belum tersedia layanan permohonan bagi CTKI baru	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Ya	119
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Ya	163
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Ya	63
6. Belum tersedia layanan permohonan paspor hilang dan rusak	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Ya	120
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Ya	164
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Ya	64
7. Pemohon mendapatkan notifikasi email tidak real time	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Ya	122
	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Ya	166
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Ya	66
	- Melakukakn Perbaikan dari sisi Aplikasi	Ya	121

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
8. Kurangnya tereduksi masyarakat akan jenis permohonan yang diajukan	- Sosialisasi terkait cara pengisian dan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan petugas imigrasi	Ya	165
	- Melakukan Preventive maintenance seperti update patch firewall & monitoring keamanan dan Corrective maintenance blocking ip, bug fixing dan pemindahan ke PDN	Ya	65

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
1. Hanya melayani pengajuan permohonan visa pada hari dan waktu kerja	117	Eskalasi Risiko	Melakukan Pengembangan dari sisi Aplikasi Seiring arahan presiden terkait E-VOA	Aplikasi Molina	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
2. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	161	Penghindaran Risiko	melakukan Sosialisasi menggunakan media sosial	Postingan Instagram Ditjenim	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
3. Pemohon dan Penjamin mendapatkan notifikasi email tidak real time	61	Mitigasi Risiko	Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	Piket POIN, dan menggunakan aplikasi Monitoring perangkat	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
4. Animo masyarakat tidak segaris lurus dengan kemampuan Satuan Kerja	118	Eskalasi Risiko	Melakukan Pengembangan dari sisi Aplikasi Seiring arahan presiden terkait E-VOA	Aplikasi Molina	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	162	Penghindaran Risiko	melakukan Sosialisasi menggunakan media sosial	Postingan Instagram Ditjenim	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	62	Mitigasi Risiko	Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	Piket POIN, dan menggunakan aplikasi Monitoring perangkat	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
5. Belum tersedia layanan permohonan bagi CTKI baru	119	Eskalasi Risiko	Melakukan Pengembangan dari sisi Aplikasi Seiring arahan presiden terkait E-VOA	Aplikasi Molina	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	163	Penghindaran Risiko	melakukan Sosialisasi menggunakan media sosial	Postingan Instagram Ditjenim	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	63	Mitigasi Risiko	Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	Piket POIN, dan menggunakan aplikasi Monitoring perangkat	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
6. Belum tersedia layanan permohonan paspor hilang dan rusak	120	Eskalasi Risiko	Melakukan Pengembangan dari sisi Aplikasi Seiring arahan presiden terkait E-VOA	Aplikasi Molina	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	164	Penghindaran Risiko	melakukan Sosialisasi menggunakan media sosial	Postingan Instagram Ditjenim	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	64	Mitigasi Risiko	Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	Piket POIN, dan	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
				menggunakan aplikasi Monitoring perangkat		
7. Pemohon mendapatkan notifikasi email tidak real time	122	Eskalasi Risiko	Melakukan Pengembangan dari sisi Aplikasi Seiring arahan presiden terkait E-VOA	Aplikasi Molina	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	166	Penghindaran Risiko	melakukan Sosialisasi menggunakan media sosial	Postingan Instagram Ditjenim	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	66	Mitigasi Risiko	Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	Piket POIN, dan menggunakan aplikasi Monitoring perangkat	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
8. Kurangnya tereduksi masyarakat akan jenis permohonan yang diajukan	121	Eskalasi Risiko	Melakukan Pengembangan dari sisi Aplikasi Seiring arahan presiden terkait E-VOA	Aplikasi Molina	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	165	Penghindaran Risiko	melakukan Sosialisasi menggunakan media sosial	Postingan Instagram Ditjenim	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan
	65	Mitigasi Risiko	Melakukan Preventive dan Corrective maintenance	Piket POIN, dan menggunakan aplikasi Monitoring perangkat	Jan-Des	Ditsistik, Kehumasan

8. Direktorat Jenderal HAM

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Direktorat Jenderal HAM
Tugas UPR SPBE	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi UPR SPBE	<p>a. perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan pengaduan masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, penanganan pengaduan masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;</p> <p>c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, penanganan pengaduan masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;</p> <p>d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, penanganan pengaduan masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE
		Domain Layanan SPBE
		Domain Manajemen SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM
Pengelola Risiko SPBE	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
	Subkoordinator Bidang Pengembangan TIK
	Subkoordinator Bidang Pengelolaan TIK

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	Adanya spam pada aplikasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM	Serangan siber	Layanan SPBE	- Pengaduan yang benar-benar pengaduan organik menjadi terkubur dan menyulitkan pegawai dalam menanggapi aduan yang masuk. - Penuhnya penyimpanan aplikasi sehingga pengaduan baru susah terinput	Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	Masih adanya permasalahan dalam aplikasi. Salah satunya pengaduan yang ketika diklik, akan tertuju ke pegaduan yang berbeda.	Bug	Layanan SPBE	Aduan jadi sulit ditanggapi karena sulit untuk mengidentifikasi pengaduan.	Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	Adanya risiko kebocoran data karena data yang ada di Yankomas merupakan data yang sensitif.	- Serangan siber - Risiko orang dalam	Layanan SPBE	- Kerugian di sisi pengadu dan data pengadu sangat mungkin disalahgunakan. - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM.	Layanan Organisasi
		Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Ditjen HAM seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan,	Layanan SPBE	Aduan tidak dapat ditanggapi karena pegawai tidak dapat mengakses SIMASHAM.	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Ditjen HAM seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh.			
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	- Serangan Siber - Orang dalam	Layanan SPBE	- Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. - Lebih besarnya dan lebih awalnya kemungkinan usaha intervensi dengan lobi-lobi apabila kelasemen proses penilaian diketahui.	Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh kanwil.	Banyaknya lalu lintas permintaan dan proses penginputan yang terjadi dalam satu waktu.	Layanan SPBE	- Terhambatnya proses penginputan data dan data dukung oleh Kanwil. - Hilangnya kesempatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena tidak sempat terinput karena waktu proses unggah yang lama.	Layanan Organisasi
Indeks domain layanan SPBE	Negatif	Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	- Serangan Siber - Orang dalam yang mencoba mengkompromisasi proses penilaian.	Layanan SPBE	- Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. - Adanya Kabupaten/Kota yang dirugikan karena seharusnya mendapatkan predikat malah menjadi tidak dapat. Atau sebaliknya, ada Kabupaten/Kota yang diuntungkan.	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	Orang dalam yang mencoba mengkompromisasi proses penilaian.	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. - Adanya Kabupaten/Kota yang dirugikan karena seharusnya mendapatkan predikat malah menjadi tidak dapat. Atau sebaliknya, ada Kabupaten/Kota yang diuntungkan. 	Layanan Organisasi
		Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Ditjen HAM seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Ditjen HAM seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh. 	Layanan SPBE	Proses penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi terganggu.	Layanan Organisasi
		Jaringan internet yang terganggu di sisi Kanwil Kemenkumham di Daerah.	Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Kanwil seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan, 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penginputan data dukung Pemerintah Daerah ke Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi terganggu - Hilangnya kesempatan mendapatkan predikat akibat adanya data dukung yang sebenarnya ada, namun belum terinput. 	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Kanwil seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh.			
		Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	- Serangan Siber - Orang dalam	Layanan SPBE	- Terhambatnya pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM - Terhambatnya pelaksanaan kegiatan P2HAM - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM	Layanan Organisasi
		Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh peserta P2HAM.	Banyaknya lalu lintas permintaan dan proses penginputan yang terjadi dalam satu waktu.	Layanan SPBE	- Terhambatnya proses penginputan data dan data dukung oleh unit peserta P2HAM - Hilangnya kesempatan Unit Peserta P2HAM karena tidak sempat terinput karena waktu proses unggah yang lama.	Layanan Organisasi
		Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	- Serangan Siber - Orang dalam yang mencoba mengkompromisasi proses penilaian.	Layanan SPBE	- Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. - Adanya unit peserta P2HAM yang dirugikan karena seharusnya mendapatkan predikat malah menjadi tidak dapat. Atau sebaliknya, ada unit peserta P2HAM yang diuntungkan.	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	Orang dalam yang mencoba mengkompromisasi proses penilaian.	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. - Adanya unit peserta P2HAM yang dirugikan karena seharusnya mendapatkan predikat malah menjadi tidak dapat. Atau sebaliknya, ada unit peserta P2HAM yang diuntungkan. 	Layanan Organisasi
		Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Ditjen HAM seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Ditjen HAM seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh. 	Layanan SPBE	Proses P2HAM menjadi terganggu.	Layanan Organisasi
		Jaringan internet yang terganggu di sisi Unit Pusat, Kanwil Kemenkumham, dan UPT sebagai peserta P2HAM. Atau, dimungkinkan juga satker Pemda dan K/L lain apabila	Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan seperti bermasalahnya Network Switch 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penginputan data dukung unit peserta P2HAM menjadi terganggu - Hilangnya kesempatan mendapatkan predikat akibat adanya data dukung yang sebenarnya ada, namun belum terinput. 	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		P2HAM dilaksanakan sampai sejauh itu.	dan Router, Perkabelan, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh.			
		Adanya risiko kebocoran data sensitif pada penyampaian data dukung P2HAM, seperti data atau foto WBP.	- Ketidaksadaran penginput ketika melakukan penginputan data. - Serangan siber.	Layanan SPBE	Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan unit peserta P2HAM.	Layanan Organisasi
		Pra-April 2023 (Aplikasi Lama): Aplikasi yang masih berada di KSP sehingga menyulitkan penanganan apabila ada permasalahan pada sistem.	Bug	Layanan SPBE	- Terhambatnya pelaksanaan Aksi HAM - Tidak tercapainya indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Organisasi
		Aplikasi Baru: Pengubahan data yang tidak diinginkan	- Serangan siber - Intervensi orang dalam	Layanan SPBE	- Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan unit peserta P2HAM. - Berpengaruhnya integritas laporan Aksi HAM kepada Presiden, yang mana akan berpengaruh pada Sidang Dewan HAM PBB.	Layanan Organisasi
		Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb.	Layanan SPBE	Terhambatnya proses verifikasi RANHAM	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
			<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Ditjen HAM seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Ditjen HAM seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh. 			
		<p>Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di Pemda atau K/L</p>	<p>Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Ditjen HAM seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Ditjen HAM seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh. 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Terhambatnya pelaksanaan Aksi HAM - Hilangnya kesempatan Pemda atau K/L dalam mencapai penilaian pelaksanaan Aksi HAM karena data dukung yang sulit diinput. 	Layanan Organisasi
		<p>Pengumpulan informasi sulit dilakukan karena kurangnya setoran data dari UKE2 lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang kurang optimal - Waktu operator yang minim ketika melakukan penginputan data pada layanan informasi HAM seperti SIM E-Dashboard, website, dsb. - Belum adanya SPL dari aplikasi langsung ke SIM E-Dashboard 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Data Pemajuan HAM yang tidak up to date. - Data Pemajuan HAM yang kurang komprehensif. - Kinerja Ditjen HAM yang dipertanyakan. 	Layanan Organisasi

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		Adanya perubahan data yang tidak bertanggungjawab.	<ul style="list-style-type: none"> - Serangan siber - intervensi orang dalam 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas data yang diragukan. - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM 	Layanan Organisasi
		Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, dan masyarakat yang mengakses internet.	<p>Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan yang disebabkan dari ISP pihak ketiga seperti FO Cut, adanya gangguan massal, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari infrastruktur jaringan Ditjen HAM seperti bermasalahnya Network Switch dan Router, Perkabelan, dsb. - Gangguan yang disebabkan dari WiFi di Ditjen HAM seperti interferensi dan utilitas kanal frekuensi WiFi yang jenuh. 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Terhambatnya layanan informasi HAM di sisi Ditjen HAM dan Kanwil Kemenkumham sebagai produsen data. - Terhambatnya masyarakat dalam mengakses Layanan Informasi HAM. 	Layanan Organisasi
		Risiko kebocoran data perusahaan yang melakukan self-assessment	<ul style="list-style-type: none"> - Serangan siber - Intervensi orang dalam 	Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian pada perusahaan yang melakukan self-assessment karena keuntungan/kelemahannya di sisi BHR dapat dieksploitasi perusahaan lain untuk 'menyerang' perusahaan tersebut. - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM 	Layanan Organisasi
		Server overload pada saat tertentu	Banyaknya lalu lintas permintaan dan proses penginputan yang terjadi dalam satu waktu.	Layanan SPBE	Terhambatnya layanan self-assessment perusahaan terhadap Bisnis dan HAM (BHR)	Layanan Organisasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Adanya spam pada aplikasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir pasti terjadi	Adanya orang iseng atau memang serangan tertarget saat ini masih sering terjadi dan Direktorat Yankomas sering membersihkannya. Kemungkinan kejadian ini ada di atas 70%.	Signifikan	Risiko proses bisnis terkendala cukup fatal untuk risiko yang disebabkan oleh bug. Diperkirakan lebih dari 50% proses bisnis terkendala apabila masalah ini terjadi.	23	Sangat Tinggi
Masih adanya permasalahan dalam aplikasi. Salah satunya pengaduan yang ketika diklik, akan tertuju ke pegaduan yang berbeda.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Eskalasi permasalahan ke Pusdatin apabila terjadi bug (Aplikasi berjalan sekarang)	Hampir pasti terjadi	Ada banyak laporan hal ini terjadi dan masih terjadi meskipun telah diperbaiki oleh Pusdatin. Kemungkinan kejadian ini ada di atas 70%.	Signifikan	Risiko proses bisnis terkendala cukup fatal untuk risiko yang disebabkan oleh bug. Diperkirakan lebih dari 50% proses bisnis terkendala apabila masalah ini terjadi.	23	Sangat Tinggi
Adanya risiko kebocoran data karena data yang ada di Yankomas merupakan data yang sensitif.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir tidak terjadi	Belum ada laporan mengenai hal ini, namun kami tidak menutup kemungkinan kebocoran data ini. Kemungkinan	Signifikan	Risiko proses bisnis terkendala cukup fatal untuk risiko yang disebabkan oleh bug. Diperkirakan lebih dari 50% proses bisnis terkendala apabila masalah ini terjadi.	8	Rendah
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Hampir pasti terjadi	Dalam satu hari pasti ada keluhan mengenai jaringan internet.	Sangat Signifikan	Risiko proses bisnis terkendala dengan menggunakan aplikasi sangat fatal. Lebih dari 80% proses bisnis terhambat atas hal ini. Namun, proses telaahan masih dapat	25	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					dilakukan dengan catatan dokumen lampiran sudah diunduh.		
Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir tidak terjadi	Tidak ada laporan mengenai hal ini	Signifikan	Kinerja memang tidak terdampak, namun bocornya data dapat berdampak fatal bagi kredibilitas Ditjen HAM dan Kementerian Hukum dan HAM.	8	Rendah
Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh kanwil.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Hampir pasti terjadi	Hampir pasti terjadi pada saat batas waktu penginputan sudah dekat.	Cukup Signifikan	Secaa proses bisnis, tidak ada dampak. Namun Kabupaten/Kota dapat beresiko tidak mendapatkan penghargaan, meskipun kalau terunggah semua, penghargaan pastinya dapat diraih.	18	Tinggi
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Sering Terjadi	Pada saat batas waktu sudah dekat, atau sudah lewat, selalu ada permintaan perubahan suatu hal, entah itu batas waktu penginputan, atau hal lainnya di mana permintaan tersebut berpotensi menguntungkan salah satu Kabupaten/Kota. Untuk ancaman siber, sampai saat ini belum ada laporan.	Sangat Signifikan	Nilai dapat berubah, atau ada pihak yang diuntungkan/dirugikan dari tindakan ini.	24	Sangat Tinggi
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Sering Terjadi	Saat ini aplikasi sudah dapat mengakomodir semua hal yang diperlukan di dalam proses Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, namun masih	Sangat Signifikan	Nilai dapat berubah, atau ada pihak yang diuntungkan/dirugikan dari tindakan ini.	24	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
			terjadi keputusan-keputusan yang pada akhirnya menganulir hasil dari Aplikasi.				
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Hampir pasti terjadi	Dalam satu hari pasti ada keluhan mengenai jaringan internet.	Sangat Signifikan	Proses pelaksanaan verifikasi Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi terhambat, atau bahkan berhenti sama sekali.	25	Sangat Tinggi
Jaringan internet yang terganggu di sisi Kanwil Kemenkumham di Daerah.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir pasti terjadi	Keluhan sering terjadi pada saat penginputan data dan data dukung.	Sangat Signifikan	Proses penginputan Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi terhambat, atau bahkan berhenti sama sekali.	25	Sangat Tinggi
Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir tidak terjadi	Tidak ada laporan mengenai hal ini	Signifikan	Secaa proses bisnis, tidak ada dampak. Namun Peserta Pelayanan Publik Berbasis HAM dapat beresiko tidak mendapatkan penghargaan, meskipun kalau terunggah semua, penghargaan pastinya dapat diraih.	20	Tinggi
Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh peserta P2HAM.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Hampir pasti terjadi	Hampir pasti terjadi pada saat batas waktu penginputan sudah dekat.	Cukup Signifikan	Secaa proses bisnis, tidak ada dampak. Namun Peserta Pelayanan Publik Berbasis HAM dapat beresiko tidak mendapatkan penghargaan, meskipun kalau terunggah semua, penghargaan pastinya dapat diraih.	5	Rendah

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Sering Terjadi	Pada saat batas waktu sudah dekat, atau sudah lewat, sering ada permintaan perubahan suatu hal, entah itu batas waktu penginputan, atau hal lainnya di mana permintaan tersebut berpotensi menguntungkan salah satu Peserta P2HAM. Untuk ancaman siber, sampai saat ini belum ada laporan.	Sangat Signifikan	Nilai dapat berubah, atau ada pihak yang diuntungkan/dirugikan dari tindakan ini.	24	Sangat Tinggi
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Sering Terjadi	Saat ini aplikasi sudah dapat mengakomodir semua hal yang diperlukan di dalam proses Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM, namun seringkali terjadi keputusan-keputusan yang pada akhirnya menganulir hasil dari Aplikasi.	Sangat Signifikan	Nilai dapat berubah, atau ada pihak yang diuntungkan/dirugikan dari tindakan ini.	24	Sangat Tinggi
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Hampir pasti terjadi	Dalam satu hari pasti ada keluhan mengenai jaringan internet.	Sangat Signifikan	Proses pelaksanaan verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM menjadi terhambat, atau bahkan berhenti sama sekali.	25	Sangat Tinggi
Jaringan internet yang terganggu di sisi Unit Pusat, Kanwil Kemenkumham, dan UPT sebagai peserta P2HAM. Atau, dimungkinkan juga satker Pemda dan K/L lain apabila P2HAM dilaksanakan sampai sejauh itu.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir pasti terjadi	Keluhan sering terjadi pada saat penginputan data dan data dukung.	Sangat Signifikan	Proses pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM menjadi terhambat, atau bahkan berhenti sama sekali.	25	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Adanya risiko kebocoran data sensitif pada penyampaian data dukung P2HAM, seperti data atau foto WBP.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir tidak terjadi	Belum ada laporan mengenai hal ini, namun kami tidak menutup kemungkinan kebocoran data ini.	Sangat Signifikan	Kinerja memang tidak terdampak, namun bocornya data dapat berdampak fatal bagi kredibilitas Ditjen HAM dan Kementerian Hukum dan HAM.	20	Tinggi
Pra-April 2023 (Aplikasi Lama): Aplikasi yang masih berada di KSP sehingga menyulitkan penanganan apabila ada permasalahan pada sistem.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jarang terjadi	Risiko masalah dari aplikasi: 10% Kepatuhan terhadap peraturan: - SOP Pengelolaan TIK	Sangat signifikan	Ada beberapa upaya yang diketahui (berdasarkan penjelasan dari KSP) yang bersifat serangan siber. Karena peran aplikasi ini penting dalam proses bisnis, maka terdampaknya proses bisnis terhadap aplikasi ini apabila bermasalah sangat besar.	21	Sangat Tinggi
Aplikasi Baru: Perubahan data yang tidak diinginkan	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir tidak terjadi	Tidak ada laporan mengenai hal ini	Sangat Signifikan	Nilai dapat berubah, atau ada pihak yang diuntungkan/dirugikan dari tindakan ini.	20	Tinggi
Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Hampir pasti terjadi	Dalam satu hari pasti ada keluhan mengenai jaringan internet.	Sangat Signifikan	Proses pelaksanaan verifikasi RANHAM menjadi terhambat, atau bahkan berhenti sama sekali.	25	Sangat Tinggi
Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di Pemda atau K/L	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir pasti terjadi	Keluhan sering terjadi pada saat penginputan data dan data dukung, serta verifikasi.	Signifikan	Proses pelaporan RANHAM menjadi terhambat, atau bahkan berhenti sama sekali.	23	Sangat Tinggi
Pengumpulan informasi sulit dilakukan karena kurangnya setoran data dari UKE2 lainnya.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Sering terjadi	Data hampir dapat dipastikan tidak up to date, kecuali dari Yankomas dan Diseminasi dan Penguatan HAM saja.	Kurang signifikan	- Terhambatnya layanan informasi HAM. - Risiko pencurian data sensitif	12	Sedang

Analisis Risiko Dampak

Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
					- Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM		
Adanya perubahan data yang tidak bertanggungjawab.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Hampir tidak terjadi	Pernah ada laporan ada seorang <i>white hacker</i> yang memberitahukan kepada kami bahwa ada celah dalam salah satu aplikasi yang masuk dalam layanan ini.	Sangat Signifikan	- Integritas data yang diragukan. - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM	20	Tinggi
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, dan masyarakat yang mengakses internet.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Hampir pasti terjadi	Dalam satu hari pasti ada keluhan mengenai jaringan internet.	Sangat Signifikan	Terhambatnya layanan informasi HAM	25	Sangat Tinggi
Risiko kebocoran data perusahaan yang melakukan self-assessment	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jarang terjadi	Belum ada laporan mengenai hal ini, namun kami tidak menutup kemungkinan kebocoran data ini. Kemungkinan	Signifikan	- Kerugian pada perusahaan yang melakukan self-assessment karena keuntungan/kelemahannya di sisi BHR dapat dieksploitasi perusahaan lain untuk 'menyerang' perusahaan tersebut. - Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal HAM	13	Sedang
Server overload pada saat tertentu	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jarang terjadi	Volume dari aplikasi ini belum banyak digunakan, namun tidak menutup kemungkinan hal ini	Signifikan	- terhambatnya layanan self-assessment	13	Sedang

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
			akan sering terjadi di kemudian hari.		perusahaan terhadap Bisnis dan HAM (BHR)		

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Adanya spam pada aplikasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	29
Masih adanya permasalahan dalam aplikasi. Salah satunya pengaduan yang ketika diklik, akan tertuju ke pegaduan yang berbeda.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Eskalasi permasalahan ke Pusdatin apabila terjadi bug (Aplikasi berjalan sekarang)	Ya	30
Adanya risiko kebocoran data karena data yang ada di Yankomas merupakan data yang sensitif.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	151
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Ya	4
Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	152
Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh kanwil.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Ya	87
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Ya	19
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Ya	20
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Ya	5
Jaringan internet yang terganggu di sisi Kanwil Kemenkumham di Daerah.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	6
Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	76

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh peserta P2HAM.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Ya	167
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Ya	21
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Logging	Ya	22
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Ya	7
Jaringan internet yang terganggu di sisi Unit Pusat, Kanwil Kemenkumham, dan UPT sebagai peserta P2HAM. Atau, dimungkinkan juga satker Pemda dan K/L lain apabila P2HAM dilaksanakan sampai sejauh itu.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	8
Adanya risiko kebocoran data sensitif pada penyampaian data dukung P2HAM, seperti data atau foto WBP.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	77
Pra-April 2023 (Aplikasi Lama): Aplikasi yang masih berada di KSP sehingga menyulitkan penanganan apabila ada permasalahan pada sistem.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	67
Aplikasi Baru: Pengubahan data yang tidak diinginkan	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	78
Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	- Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Ya	9
Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di Pemda atau K/L	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	31
Pengumpulan informasi sulit dilakukan karena kurangnya setoran data dari UKE2 lainnya.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	135
Adanya pengubahan data yang tidak bertanggungjawab.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	79
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, dan masyarakat yang mengakses internet.	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi - Kegiatan Pengelolaan Server dan Jaringan	Ya	10
Risiko kebocoran data perusahaan yang melakukan self-assessment	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	128

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Server overload pada saat tertentu	- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Ya	129

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Adanya spam pada aplikasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM	29	Mitigasi Risiko	- Eskalasi ke Pusdatin untuk perbaikan Bug. - Pembuatan aplikasi SIMASHAM Baru	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi - Dokumen pengembangan aplikasi - Aplikasi SIMASHAM	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Masih adanya permasalahan dalam aplikasi. Salah satunya pengaduan yang ketika diklik, akan tertuju ke pegaduan yang berbeda.	30	Mitigasi Risiko	- Eskalasi ke Pusdatin untuk perbaikan Bug. - Pembuatan aplikasi SIMASHAM Baru	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi - Dokumen pengembangan aplikasi - Aplikasi SIMASHAM	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Adanya risiko kebocoran data karena data yang ada di Yankomas merupakan data yang sensitif.	151	Mitigasi Risiko	- Eskalasi ke Pusdatin untuk perbaikan Bug. - Pembuatan aplikasi SIMASHAM Baru	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi - Dokumen pengembangan aplikasi - Aplikasi SIMASHAM	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	4	Mitigasi Risiko	Pengelolaan Server dan Jaringan: - Optimasi WiFi - Penggantian Switch baru	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi - Dokumen Pengelolaan Server dan Jaringan	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
			Asistensi masalah di daerah.			
Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	152	Mitigasi Risiko	- Eskalasi keamanan server dengan Pusdatin - Bug fixing	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh kanwil.	87	Mitigasi Risiko	- Eskalasi ke Pusdatin untuk fasilitasi permintaan khusus	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	19	Mitigasi Risiko	- Penekanan pentingnya logging yang sudah ada di Aplikasi - Untuk serangan siber, perbaikan bug dan eskalasi ke Pusdatin.	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	- Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Kerja Sama HAM
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	20	Mitigasi Risiko	- Komunikasi antara Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM dan Direktorat Kerja Sama HAM - Direktorat Fasilitasi dan Informasi menyerahkan sepenuhnya keputusan substantif pada Direktorat Kerja Sama HAM apabila ada hal-hal di luar aplikasi yang mempengaruhi penilaian, dan sudah sebisa mungkin memfasilitasi permintaan pada aplikasi sesuai kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya,	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	- Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Kerja Sama HAM

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
			termasuk meminimalisir potensi seperti ini.			
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	5	Mitigasi Risiko	Pengelolaan Server dan Jaringan: - Optimasi WiFi - Penggantian Switch baru	- Dokumen Pengelolaan Server dan Jaringan	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Jaringan internet yang terganggu di sisi Kanwil Kemenkumham di Daerah.	6	Mitigasi Risiko	- Asistensi masalah - Eskalasi ke Pusdatin	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Risiko kebocoran data pada saat proses penilaian	76	Mitigasi Risiko	- Eskalasi keamanan server dengan Pusdatin - Bug fixing	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Server overload menjelang akhir masa penginputan oleh peserta P2HAM.	167	Mitigasi Risiko	- Eskalasi ke Pusdatin untuk fasilitasi permintaan khusus	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di dalam aplikasi	21	Mitigasi Risiko	- Penekanan pentingnya logging yang sudah ada di Aplikasi - Untuk serangan siber, perbaikan bug dan eskalasi ke Pusdatin.	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	- Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM
Intervensi pada proses penilaian yang terjadi di luar aplikasi	22	Mitigasi Risiko	- Komunikasi antara Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM dan Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM - Direktorat Fasilitasi dan Informasi menyerahkan sepenuhnya keputusan substantif pada Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM apabila ada hal-hal di luar aplikasi	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	- Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
			yang mempengaruhi penilaian, dan sudah sebisa mungkin memfasilitasi permintaan pada aplikasi sesuai kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya, termasuk meminimalisir potensi seperti ini.			
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	7	Mitigasi Risiko	Pengelolaan Server dan Jaringan: - Optimasi WiFi - Penggantian Switch baru	- Dokumen Pengelolaan Server dan Jaringan	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Jaringan internet yang terganggu di sisi Unit Pusat, Kanwil Kemenkumham, dan UPT sebagai peserta P2HAM. Atau, dimungkinkan juga satker Pemda dan K/L lain apabila P2HAM dilaksanakan sampai sejauh itu.	8	Mitigasi Risiko	- Asistensi masalah - Eskalasi ke Pusdatin	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Adanya risiko kebocoran data sensitif pada penyampaian data dukung P2HAM, seperti data atau foto WBP.	77	Mitigasi Risiko	-Bug fixing - Eskalasi masalah ke Pusdatin apabila terkait keamanan server	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Pra-April 2023 (Aplikasi Lama): Aplikasi yang masih berada di KSP sehingga menyulitkan penanganan	67	Mitigasi Risiko	- Koordinasi dengan KSP - Pengembangan aplikasi baru (SAPAHAM)	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi - Dokumen Pengembangan Aplikasi - Aplikasi SAPAHAM	Jan - Des	- Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Kerja Sama HAM

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
apabila ada permasalahan pada sistem.						
Aplikasi Baru: Pengubahan data yang tidak diinginkan	78	Mitigasi Risiko	<p>By Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penekanan pentingnya logging yang sudah ada di Aplikasi - Untuk serangan siber, perbaikan bug dan eskalasi ke Pusdatin. <p>Konflik Kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi antara Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM dan Direktorat Kerja Sama HAM - Direktorat Fasilitasi dan Informasi menyerahkan sepenuhnya keputusan substantif pada Direktorat Kerja Sama HAM apabila ada hal-hal di luar aplikasi yang mempengaruhi penilaian, dan sudah sebisa mungkin memfasilitasi permintaan pada aplikasi sesuai kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya, termasuk meminimalisir potensi seperti ini. 	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Kerja Sama HAM

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM	9	Mitigasi Risiko	Pengelolaan Server dan Jaringan: - Optimasi WiFi - Penggantian Switch baru	- Dokumen Pengelolaan Server dan Jaringan	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Aplikasi Baru: Jaringan internet yang terganggu di Pemda atau K/L	31	Mitigasi Risiko	- Asistensi masalah - Eskalasi ke Pusdatin	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Pengumpulan informasi sulit dilakukan karena kurangnya setoran data dari UKE2 lainnya.	135	Mitigasi Risiko	- Monitoring dan evaluasi	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Adanya perubahan data yang tidak bertanggungjawab.	79	Mitigasi Risiko	- Monitoring dan evaluasi	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Jaringan internet yang terganggu di sisi Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, dan masyarakat yang mengakses internet.	10	Mitigasi Risiko	Internal Ditjen HAM - Pengelolaan Server dan Jaringan: - Optimasi WiFi - Penggantian Switch baru Eksternal: - Asistensi Masalah - Eskalasi ke Pusdatin	- Dokumen Pengelolaan Server dan Jaringan - Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK
Risiko kebocoran data perusahaan yang melakukan self-assessment	128	Mitigasi Risiko	-Bug fixing - Eskalasi masalah ke Pusdatin apabila terkait keamanan server - Pengembangan Aplikasi PRISMA V2	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi - Dokumen pengembangan aplikasi - Aplikasi PRISMA V2	Jan - Des	- Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK - Direktorat Kerja Sama HAM
Server overload pada saat tertentu	129	Mitigasi Risiko	- Monitoring dan Evaluasi - Eskalasi ke Pusdatin	- Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi	Jan - Des	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengelolaan TIK

9. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Tugas UPR SPBE	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
Fungsi UPR SPBE	terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi untuk melaksanakan percepatan transformasi digital nasional dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah.	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi dan tersedianya informasi peraturan perundang-undangan	Domain Layanan SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Pengelola Risiko SPBE	- Koordinator Bidang Sistem Informasi - Subkoordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

- Subkoordinator Bidang Pengelolaan data dan informasi Sistem Informasi

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain layanan SPBE	Negatif	- Aplikasi belum diproteksi secara maksimal - Kebijakan dan prosedur belum diterapkan secara maksimal	Cyberattack	Layanan SPBE	Proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan menjadi kurang sempurna tanpa partisipasi masyarakat	Hukum dan Regulasi
Domain layanan SPBE	Negatif	Proses security awareness belum efektif	Cyberattack	Layanan SPBE	Terhambatnya proses pemuktahiran data peraturan perundang-undangan ke masyarakat	Hukum dan Regulasi
Domain layanan SPBE	Negatif	Belum optimal penggunaan Sistem Aplikasi Layanan oleh Kementerian /Lembaga Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Cyberattack	Layanan SPBE	Proses permohonan pengundangan menjadi panjang dan tidak efektif	Hukum dan Regulasi

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
- Aplikasi belum diproteksi secara maksimal - Kebijakan dan prosedur belum diterapkan secara maksimal	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot aplikasi Partisipasi publik (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS	Jarang terjadi	5% < X ≤ 10%	Sangat signifikan	Penurunan Kinerja ≥ 80%	21	Sangat
- Proses security awareness belum efektif	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS	Jarang terjadi	5% < X ≤ 10%	Signifikan	Penurunan Kinerja 60% s.d. <80%	13	Sedang
Belum optimal penggunaan Sistem Aplikasi Layanan oleh Kementerian /Lembaga Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan pengajuan uji sistem pada BSSN untuk Penetration Test	Jarang terjadi	5% < X ≤ 10%	Kurang signifikan	Penurunan Kinerja 20% s.d. <40%	7	Rendah

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
- Aplikasi belum diproteksi secara maksimal - Kebijakan dan prosedur belum diterapkan secara maksimal	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot aplikasi Partisipasi publik (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS	Ya	68

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
- Proses security awareness belum efektif	- Koordinasi dengan Pusdatin untuk troubleshoot JDIHN (Infra dan Security) - Melakukan pengecekan ke VPS	Ya	130
Belum optimal penggunaan Sistem Aplikasi Layanan oleh Kementerian /Lembaga Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan pengajuan uji sistem pada BSSN untuk Penetration Test	Ya	154

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
- Aplikasi belum diproteksi secara maksimal - Kebijakan dan prosedur belum diterapkan secara maksimal	68	Mitigasi resiko	Koordinasi dengan Pusdatin	Data dan informasi setiap proses pembentukan PUU	Jan - Des	Sub bidang perancangan
- Proses security awareness belum efektif	130	Mitigasi resiko	Koordinasi dengan Pusdatin	Data dan informasi Peraturan perundang-undangan	Jan - Des	Sub bidang sisinfo
Belum optimal penggunaan Sistem Aplikasi Layanan oleh Kementerian /Lembaga Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	154	Mitigasi resiko	Koordinasi dengan Pusdatin	Layanan pengundangan	Jan - Des	Sub bidang pengundangan

10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Tugas UPR SPBE	memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Fungsi UPR SPBE	<ul style="list-style-type: none">a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;c. evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;d. pengelolaan urusan kepegawaian dan fasilitasi reformasi birokrasi;e. pengelolaan urusan keuangan;f. pengelolaan urusan barang milik negara dan umum;g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama dan keprotokolan; danh. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan kerumahtanggaan.
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi • Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya layanan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang terpadu • Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi 	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE
		Domain Layanan SPBE
		Domain Manajemen SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Jusman, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
Koordinator Risiko SPBE	Chusni Thamrin Koordinator Sistem Informasi Puspenkom
Pengelola Risiko SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Widyantoro, Sub Koordinator Data dan Informasi Puspenkom 2. Deddy Darmawan, Sub Koordinator Sistem dan Jaringan

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Kebijakan SPBE	Negatif	Kendala pada proses bisnis layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan belum disusun dan/atau belum dievaluasi 2. Tidak dilakukan sosialisasi terkait kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses bisnis • Kepatuhan terhadap peraturan • Layanan SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reputasi organisasi menjadi buruk 2. Layanan organisasi tidak berjalan dengan baik 3. Kinerja tidak terukur 4. Sumber daya manusia tidak berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Reputasi • Kinerja • Layanan organisasi • Sumber Daya Manusia
Domain Kebijakan SPBE	Negatif	Penyalahgunaan wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku 2. Tidak dilakukan evaluasi pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses bisnis • Kepatuhan terhadap peraturan • Layanan SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reputasi organisasi menjadi buruk 2. Layanan organisasi tidak berjalan dengan baik 3. Kinerja tidak terukur 4. Sumber daya manusia tidak berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Reputasi • Kinerja • Layanan organisasi • Sumber Daya Manusia
Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/penggalian di area yang sama dengan lintasan fiber dan kejadian force majeure lain 2. SLA dari ISP tidak terpenuhi karena kendala dari ISP 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi • Infrastruktur SPBE • Aplikasi SPBE • Keamanan SPBE • Layanan SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya layanan perkantoran yang menggunakan layanan internet 2. Terhambatnya sistem layanan perkantoran yang menggunakan aplikasi 3. Layanan organisasi terganggu 4. Kinerja layanan terganggu 5. Operasional dan asset TIK terganggu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja • Layanan organisasi • Operasional dan asset TIK
Domain Tata Kelola SPBE	Negatif	Adanya vulnerability infrastruktur dan aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilakukan proses verifikasi kelayakan aplikasi sebelum di-hosting 2. Dokumen terkait infrastruktur dan aplikasi belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi • Infrastruktur SPBE • Aplikasi SPBE • Keamanan SPBE • Layanan SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya sistem layanan perkantoran yang menggunakan aplikasi 2. Layanan organisasi terganggu 3. Kinerja layanan terganggu 4. Operasional dan asset TIK terganggu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja • Layanan organisasi • Operasional dan asset TIK

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan aplikasi tidak termonitor Terjadi celah akses informasi Mal Konfigurasi 	<ul style="list-style-type: none"> Proses bisnis Data dan informasi Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Keamanan SPBE Layanan SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> Proses bisnis terhenti Kehilangan/kerusakan data Kerusakan aplikasi Pemborosan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Finansial Reputasi Kinerja Layanan organisasi Operasional dan asset TIK Hukum dan Regulasi
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> Terjadi pergantian pengelola aplikasi Terjadi perubahan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Proses bisnis Data dan informasi Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Keamanan SPBE Layanan SPBE Kepatuhan terhadap Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Proses bisnis terhenti Pemborosan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Finansial Reputasi Kinerja Layanan organisasi Operasional dan asset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terhentinya proses pengembangan aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> Kekurangan sumber daya dalam pengembangan aplikasi Terjadi pergantian developer aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Proses bisnis Data dan informasi Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Keamanan SPBE Layanan SPBE Kepatuhan terhadap Peraturan SDM SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> Proses bisnis terhenti Pemborosan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Finansial Reputasi Kinerja Layanan organisasi Operasional dan asset TIK Sumber Daya Manusia
Domain Layanan SPBE	Negatif	Aplikasi tidak dapat diakses	Gangguan pada server aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Proses bisnis Data dan informasi Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Keamanan SPBE Layanan SPBE Kepatuhan terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> Proses bisnis terhenti Kehilangan/kerusakan data Kerusakan aplikasi Pemborosan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Finansial Reputasi Kinerja Layanan organisasi Operasional dan asset TIK

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
				Peraturan • Bencana alam		
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Terjadinya kerusakan data	1. Penggunaan Komponen sistem informasi yang tidak uptodate/memiliki kerentanan 2. Adanya SQL Injection dan/atau serangan 3. Tidak melakukan patching pada kerentanan aplikasi	• Data dan informasi • Infrastruktur SPBE • Aplikasi SPBE • Keamanan SPBE • Layanan SPBE	1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya	• Reputasi • Kinerja • Layanan organisasi • Operasional dan asset TI • Hukum dan Regulasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Terjadinya kehilangan data	1. Adanya SQL Injection dan/atau serangan 2. Tidak melakukan patching pada kerentanan aplikasi	• Data dan informasi • Infrastruktur SPBE • Aplikasi SPBE • Keamanan SPBE • Layanan SPBE	1. Data tidak akurat 2. Data hilang 3. Layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya	• Reputasi • Kinerja • Layanan organisasi • Operasional dan asset TI • Hukum dan Regulasi
Domain Manajemen SPBE	Negatif	SDM tidak inovatif, tidak sinergis, lambat dan malas	1. SDM tidak memiliki kompetensi 2. Kurangnya pelatihan teknis 3. Penempatan pegawai tidak sesuai Peta Jabatan 4. Dokumen ABK tidak dievaluasi	• Proses bisnis • Inovasi • Layanan SPBE • SDM SPBE	1. Output tidak tercapai 2. Kinerja organisasi menurun 3. Reputasi buruk	• Reputasi • Kinerja • Layanan organisasi • Operasional dan asset TI • Sumber daya manusia
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Sulit menghadapi perubahan	Tidak melakukan keseluruhan proses di Manajemen Perubahan	• Proses bisnis • Layanan SPBE • Kepatuhan terhadap Peraturan	Kinerja organisasi menurun	• Reputasi • Layanan organisasi • Operasional dan asset TI
Domain Manajemen SPBE	Negatif	Risiko tidak terkontrol	Kemungkinan risiko tidak terprediksi	• Proses bisnis • Layanan SPBE • Kepatuhan terhadap Peraturan	Risiko tidak tertangani	• Reputasi • Layanan organisasi • Operasional dan asset TI

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Kendala pada proses bisnis layanan	1. Penyederhanaan proses bisnis 2. Sosialisasi kebijakan	Jarang terjadi	Risiko proses bisnis terkendala kurang dari 10%	Signifikan	Penurunan kinerja sekitar 60% s.d. 80%	13	Sedang
Penyalahgunaan wewenang	1. Penyederhanaan proses bisnis 2. Sosialisasi kebijakan 3. Evaluasi layanan	Jarang terjadi	Risiko penyalahgunaan wewenang kurang dari 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	Pemeliharaan infrastruktur jaringan	Kadang-kadang terjadi	Risiko terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
Adanya vulnerability infrastruktur dan aplikasi	Pen-testing dibantu Pusdatin	Hampir pasti terjadi	Risiko akibat vulnerability infrastruktur dan aplikasi terjadi lebih dari 50%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	25	Sangat Tinggi
Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	1. Monitoring DNS Server dan webservice 2. Monitoring Web Application Firewall	Kadang-kadang terjadi	Risiko terjadinya fserangan siber terhadap aplikasi antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	Penyusunan proses bisnis baru	Kadang-kadang terjadi	Risiko terhentinya proses pemeliharaan aplikasi antara 10% s.d. 20%	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	14	Sedang
Terhentinya proses pengembangan aplikasi	1. Pembagian tugas tim 2. Peningkatan kompetensi SDM 3. Penyusunan anggaran	Kadang-kadang terjadi	Risiko terhentinya proses pengembangan aplikasi antara 10% s.d. 20%	Signifikan	Penurunan kinerja sekitar 60% s.d. 80%	17	Tinggi
Aplikasi tidak dapat diakses	1. Monitoring DNS Server dan webservice	Kadang-kadang terjadi	Risiko aplikasi tidak dapat diakses antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
	2. Monitoring Web Application Firewall						
Terjadinya kerusakan data	1. Update komponen sistem aplikasi 2. Pemasangan Web Application Firewall pada server aplikasi 3. Patching aplikasi	Jarang terjadi	Risiko terjadinya kerusakan data kurang dari 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
Terjadinya kehilangan data	1. Update komponen sistem aplikasi 2. Pemasangan Web Application Firewall pada server aplikasi 3. Patching aplikasi	Jarang terjadi	Risiko terjadinya kehilangan data kurang dari 10%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	21	Sangat Tinggi
SDM tidak inovatif, tidak sinergis, lambat dan malas	1. Pelaksanaan pelatihan teknis guna peningkatan kompetensi SDM 2. Evaluasi ABK dan Peta Jabatan	Kadang-kadang terjadi	Risiko SDM tidak inovatif, tidak sinergis, lambat dan malas antara 10% s.d. 20%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	22	Sangat Tinggi
Sulit menghadapi perubahan	Pemantauan penerapan Manajemen Perubahan	Hampir tidak terjadi	Kemungkinan tidak terlaksananya Manajemen Perubahan kurang dari 5%	Tidak signifikan	Penurunan kinerja sekitar kurang dari 20%	1	Sangat Rendah
Risiko tidak terkontrol	Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko	Sering terjadi	Penanganan terhadap risiko yang terlaksana hanya 30%	Sangat Signifikan	Penurunan kinerja mencapai lebih dari 80%	24	Sangat Tinggi

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Kendala pada proses bisnis layanan	1. Penyederhanaan proses bisnis 2. Sosialisasi kebijakan	Ya	131
Penyalahgunaan wewenang	1. Penyederhanaan proses bisnis 2. Sosialisasi kebijakan 3. Evaluasi layanan	Ya	69
Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	Pemeliharaan infrastruktur jaringan	Ya	42
Adanya vulnerability infrastruktur dan aplikasi	Pen-testing dibantu Pusdatin	Ya	11
Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	1. Monitoring DNS Server dan webservice 2. Monitoring Web Application Firewall	Ya	43
Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	Penyusunan proses bisnis baru	Ya	123
Terhentinya proses pengembangan aplikasi	1. Pembagian tugas tim 2. Peningkatan kompetensi SDM 3. Penyusunan anggaran	Ya	95
Aplikasi tidak dapat diakses	1. Monitoring DNS Server dan webservice 2. Monitoring Web Application Firewall	Ya	44
Terjadinya kerusakan data	1. Update komponen sistem aplikasi 2. Pemasangan Web Application Firewall pada server aplikasi 3. Patching aplikasi	Ya	70
Terjadinya kehilangan data	1. Update komponen sistem aplikasi 2. Pemasangan Web Application Firewall pada server aplikasi 3. Patching aplikasi	Ya	71
SDM tidak inovatif, tidak sinergis, lambat dan malas	1. Pelaksanaan pelatihan teknis guna peningkatan kompetensi SDM 2. Evaluasi ABK dan Peta Jabatan	Ya	45
Sulit menghadapi perubahan	Pemantauan penerapan Manajemen Perubahan	Ya	169
Risiko tidak terkontrol	Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko	Ya	23

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
Kendala pada proses bisnis layanan	131	Mitigasi Risiko	1. Menyusun standar kebijakan dan SOP layanan 2. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan	Dokumen kebijakan standar layanan	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Penyalahgunaan wewenang	69	Mitigasi Risiko	Melakukan sosialisasi terkait kebijakan	Pemberian penghargaan dan hukuman dalam penyelenggaraan layanan	Jan - Des	Bagian Kepegawaian
Terjadinya fiber cut dan/atau putus koneksi jaringan akses internet	42	Mitigasi Risiko	1. Menyusun Dokumen SLA dan/atau melakukan evaluasi SLA 2. Melakukan komunikasi dengan ISP dan pemangku TI	1. Dokumen SLA ISP 2. Dokumen SLA Pemeliharaan infrastruktur	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Adanya vulnerability infrastruktur dan aplikasi	11	Mitigasi Risiko	1. Menyusun dokumen terkait infrastruktur dan aplikasi 2. Melakukan komunikasi dengan pemangku TI terkait	Dokumen SLA Pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Terjadinya serangan siber terhadap aplikasi	43	Mitigasi Risiko	1. Melakukan evaluasi SLA 2. Melakukan komunikasi dengan pemangku TI terkait	Dokumen SLA Pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Terhentinya proses pemeliharaan aplikasi	123	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan manajemen aplikasi	Kebijakan manajemen aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Terhentinya proses pengembangan aplikasi	95	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan manajemen aplikasi	Kebijakan manajemen aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Aplikasi tidak dapat diakses	44	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan manajemen aplikasi	Kebijakan manajemen aplikasi	Jan - Des	Sub Bidang Sistem dan Jaringan
Terjadinya kerusakan data	70	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan manajemen data	Kebijakan manajemen data	Jan - Des	Sub Bidang Data dan Informasi
Terjadinya kehilangan data	71	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan manajemen data	Kebijakan manajemen data	Jan - Des	Sub Bidang Data dan Informasi
SDM tidak inovatif, tidak sinergis, lambat dan malas	45	Mitigasi Risiko	1. Menyusun rencana peningkatan kompetensi teknis SDM	1. Dokumen rencana peningkatan kompetensi teknis SDM	Jan - Des	Bagian Kepegawaian

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
			2. Melakukan evaluasi dokumen ABK dan peta jabatan	2. Dokumen evaluasi ABK dan peta jabatan		
Sulit menghadapi perubahan	169	Mitigasi Risiko	Menyusun kebijakan manajemen perubahan	Kebijakan manajemen perubahan	Jan - Des	Sub Bidang Data dan Informasi
Risiko tidak terkontrol	23	Mitigasi Risiko	1. Melakukan evaluasi risiko 2. Menyusun kebijakan manajemen risiko	Kebijakan manajemen risiko	Jan - Des	Sub Bidang Data dan Informasi

11. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

A. Konteks Risiko SPBE

1) Informasi Umum

Informasi Umum terkait UPR SPBE	
Nama UPR SPBE	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Tugas UPR SPBE	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi UPR SPBE	<p>1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;</p> <p>2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;</p> <p>3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.</p>
Periode Waktu	Januari – Desember 2023

2) Sasaran SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya kualitas layanan kepastian hukum yang terintegrasi	Domain Kebijakan SPBE
		Domain Tata Kelola SPBE

Sasaran SPBE		
Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE
		Domain Layanan SPBE
		Domain Manajemen SPBE

3) Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Pengelola Risiko SPBE	Koordinator

B. Penilaian Risiko SPBE

1) Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE						
Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	- aplikasi layanan pendaftaran ki belum diproteksi secara maksimal	Aplikasi belum diproteksi secara maksimal	Proses Bisnis Data dan Informasi Aplikasi SPBE	- Terganggunya keberlangsungan aplikasi - Terganggunya citra dari kementrian - Terjadi risiko kerugian finansial	Reputasi Finansial Kinerja Layanan Organisasi Operasional dan Asset TIK

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Domain Layanan SPBE	Negatif	kebijakan dan prosedur LPKI belum diterapkan secara maksimal	Kebijakan dan prosedur belum diterapkan secara maksimal	Proses Bisnis Data dan Informasi Aplikasi SPBE	- Terganggunya citra dari kementerian	Reputasi Finansial Kinerja Layanan Organisasi Operasional dan Asset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Proses security awareness belum efektif	Belum adanya kesadaran seluruh individu terkait keamanan layanan digital	Kepatuhan terhadap Peraturan	- Terganggunya citra dari kementerian - Terjadi risiko kerugian finansial	Reputasi Finansial Kinerja Layanan Organisasi Operasional dan Asset TIK SDM
Domain Layanan SPBE	Negatif	Penerapan Disaster Recovery Plan belum diterapkan secara maksimal	Belum adanya rencana dan prioritas terkait Disaster Recovery Plan	Arsitektur SPBE	- Terganggunya keberlangsungan aplikasi - Terganggunya citra dari kementerian	Reputasi Finansial Kinerja Layanan Organisasi Operasional dan Asset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risikoterkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Belum terdapat dokumentasi terkait dengan inventariasi aset	Infrastruktur SPBE	-Terganggunya siklus penggantian perangkat karena tidak diketahui usia perangkat -Pembelian aset yang tidak perlu	Finansial Kinerja Operasional dan Asset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan	Belum terdapat dokumentasi serah terima aset	Infrastruktur SPBE	-Tidak adanya kepastian kepemilikan aset infrastruktur TI -Lambatnya perkembangan TI karena aset tidak dimiliki oleh instansi	Finansial Kinerja Operasional dan Asset TIK

Identifikasi Risiko SPBE

Indikator Kinerja SPBE	Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
		ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki				
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Belum terdapat dokumentasi pelabelan aset	Infrastruktur SPBE	-Kekeliruan dalam pencarian asset dan manajemen Asset -Penggunaan asset negara untuk keperluan pribadi	Operasional dan Asset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Belum terdapat kebijakan dan dokumentasi penghapusan aset	Infrastruktur SPBE	-Meningkatnya biaya pemeliharaan asset -Penuhnya space data center -Beban tanggung jawab yang terus meningkat	Finansial Operasional dan Asset TIK
Domain Layanan SPBE	Negatif	Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Belum terdapat dokumentasi User Access Matriks dari aplikasi dan accessdoor	Infrastruktur SPBE	-Kemungkinan masuknya identitas tidak dikenal ke dalam data center	Operasional dan Asset TIK

2) Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
- aplikasi layanan pendaftaran ki belum diproteksi secara maksimal	- melakukan pentest	Kadang-Kadang Terjadi	20% < X ≤ 50%	Signifikan	Penurunan Kinerja 60% s.d. <80%	17	Tinggi
kebijakan dan prosedur LPKI belum diterapkan secara maksimal	Melakukan pengawasan secara ketat dan evaluasi hasil kebijakan dan prosedur secara berkala	Kadang-Kadang Terjadi	20% < X ≤ 50%	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	14	Sedang
Proses security awareness belum efektif	Pelatihan terkait security awarness di internal instansi baik tingkat dasar untuk pegawai hingga tingkat mahir untuk tenaga ahli	Jarang Terjadi	10% < X ≤ 20%	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	11	Sedang
Penerapan Disaster Recovery Plan belum diterapkan secara maksimal	Melakukan perencanaan dan penganggaran untuk membuat dokumentasi Disaster Recovery Plan	Kadang-Kadang Terjadi	10% < X ≤ 20%	Signifikan	Penurunan Kinerja 60% s.d. <80%	17	Tinggi
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risikoterkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi terkait dengan inventarisasi aset	Kadang-Kadang Terjadi	10% < X ≤ 20%	Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	17	Tinggi
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi serah terima aset	Jarang Terjadi	5% < X ≤ 10%	Kurang Signifikan	Penurunan Kinerja 20% s.d. <40%	7	Rendah
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan	Membuat dokumentasi pelabelan aset	Jarang Terjadi	10% < X ≤ 20%	Kurang Signifikan	Penurunan Kinerja 20% s.d. <40%	7	Rendah

Analisis Risiko Dampak							
Kejadian	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
		Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki							
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat kebijakan dan dokumentasi penghapusan aset	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	19	Tinggi
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi User Access Matriks dari aplikasi dan access door	Jarang Terjadi	$X > 50\%$	Cukup Signifikan	Penurunan Kinerja 40% s.d. <60%	11	Sedang

3) Evaluasi Risiko SPBE

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
- aplikasi layanan pendaftaran ki belum diproteksi secara maksimal	- melakukan pentest	ya	96
kebijakan dan prosedur LPKI belum diterapkan secara maksimal	Melakukan pengawasan secara ketat dan evaluasi hasil kebijakan dan prosedur secara berkala	Ya	124
Proses security awareness belum efektif	Pelatihan terkait security awarness di internal instansi baik tingkat dasar untuk pegawai hingga tingkat mahir untuk tenaga ahli	Ya	141
Penerapan Disaster Recovery Plan belum diterapkan secara maksimal	Melakukan perencanaan dan pengaggaran untuk membuat dokumentasi Disaster Recovery Plan	Ya	97

Kejadian	Sistem Pengendalian	Evaluasi Risiko SPBE	
		Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risikoterkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi terkait dengan inventarasi aset	Ya	98
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi serah terima aset	Ya	155
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi pelabelan aset	Ya	156
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat kebijakan dan dokumentasi penghapusan aset	Ya	82
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	Membuat dokumentasi User Access Matriks dari aplikasi dan access door	Ya	142

C. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
- aplikasi layanan pendaftaran ki belum diproteksi secara maksimal	96	Mitigasi Risiko	- sop ttg keamanan aplikasi -Penguatan perangkat untuk perlindungan aplikasi -Penguatan keamanan	-Dokumen Penetration Testing -Dokumen Pengembangan Aplikasi	jan - des 2023	Koordinator Pengembangan Sistem informasi Kekayaan Intelektual

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
			dengan pemeriksaan celah keamanan(Pentest)			
kebijakan dan prosedur LPKI belum diterapkan secara maksimal	124	Mitigasi Risiko	-Sosialisasi SOP dan Prosedur -Monitor dan Evaluasi Berkala	-Laporan sosialisasi SOP dan Prosedur -Dokumentasi laporan kinerja	2023-2024	Koordinator Perencanaan
Proses security awareness belum efektif	141	Mitigasi Risiko	-Sosialisasi dan Pelatihan Security Digital -Penguatan keamanan IT (IDS, Firewall) -Monitor secara berkala -Evaluasi rutin	-Laporan Pelatihan Security -Laporan Evaluasi -Laporan insiden Firewall/IDS	2023-2024	Koordinator Pendukung Infrastruktur
Penerapan Disaster Recovery Plan belum diterapkan secara maksimal	97	Mitigasi Risiko	-Penggangan Disaster Recovery Plan -Perencanaan dan Konsultasi terkait Disaster Recovery Plan	-Dokumen Disaster Recovery Plan -Laporan Pengadaan Konsultasi Disaster Recovery Plan	2024-2025	Koordinator Pendukung Infrastruktur
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risikoterkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	98	Mitigasi Risiko	Membuat dokumentasi terkait dengan inventarasi aset	Dokumentasi Inventarisasi Aset TI	2023-2024	Koordinator Pendukung Infrastruktur
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	155	Mitigasi Risiko	Membuat dokumentasi serah terima aset	Dokumentasi serah terima aset TI	2023-2024	Koordinator Pendukung Infrastruktur
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan,	156	Mitigasi Risiko	Membuat dokumentasi pelabelan aset	Dokumentasi Label dan peta asset	2023-2024	Koordinator Pendukung Infrastruktur

Kejadian	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE				
		Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Impelementasi	Penanggung Jawab
kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki						
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	82	Mitigasi Risiko	Membuat kebijakan dan dokumentasi penghapusan aset	Nota Dinas Penghapusan dan Dokumen Penghapusan Asset	2023-2024	Koordinator Pendukung Infrastruktur
Terdapat potensi terganggunya pengelolaan aset TI dan terdapat risiko terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan aset TI yang dimiliki	142	Mitigasi Risiko	Membuat dokumentasi User Access Matriks dari aplikasi dan access door	Dokumentasi user access	2023-2024	Koordinator Pendukung Infrastruktur

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY